

Volume 14 Nomor 2a Agustus 2021

ISSN 1979-0856

E K O N O M I S

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Penanggung Jawab:
Harlyn Siagian MBA, Ph. D

Ketua Editor:
Dr. Romulo Sinabutar MBA

Dewan Penyunting:
Dr. Tonny Soewignyo
Prof. Dr. Marlinda Siahaan
Fanny Soewignyo MSC. Ph. D
Ronny Kountur Ph. D

Alamat Redaksi:
Fakultas Ekonomi
Universitas Advent Indonesia
Jl. Kol. Masturi 288, Telp. (022) 2700274, 2700162
Parongpong, Bandung

E K O N O M I S

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

DAFTAR ISI	Hal
PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2017 – 2019). Agnes Margareth Siregar dan Romulo Sinabutar	3
PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) Matthew dan Lorina Siregar Sudjiman	18
PENGARUH PROFITABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK Helentina dan Harman Malau	29
STUDI TENTANG FUNGSI PENGAWASAN ATAS PENGUNGKAPAN CSR Priscilla Ruth Putri dan Hisar Pangaribuan	43
PENGARUH PPN DAN PPH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK PUSAT Rano Karno dan Marthinus Ismail	57
Kebijakan Editorial dan Pedoman Penulisan Artikel	72

**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK
TERHADAP MANAJEMEN LABA ((Studi Empiris Pada Perusahaan
Subsektor Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2017 – 2019).**

Agnes Margareth Siregar¹
Romulo Sinabutar²

***ABSTRACT.** The purpose of this study is to analyze the effect between deferred tax expense and tax planning on earnings management. The research method is descriptive with a quantitative approach. The data used in this study from annual financial statements on manufacturing companies that listed on the Indonesia Stock Exchange. Based on the simultaneous test results, deferred tax expense and tax planning have a significant effect on earnings management.*

***Keywords:** Deferred tax expense, tax planning, and earnings management.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang masih sangat diperhitungkan dalam perusahaan adalah laba dimana laba memiliki peran yang cukup penting dalam hal memberikan informasi kepada pihak internal dan pihak eksternal. Bagi pihak internal, informasi tersebut berfungsi untuk melakukan tindakan perencanaan, pengkoordinasian dan juga pengendalian terhadap operasi dari perusahaan. Bagi pihak eksternal seperti kreditor dan juga investor, informasi ini berfungsi untuk mengestimasi kekuatan laba untuk mengukur besarnya risiko terhadap kredit dan investasi.

Dilansir dari www.tempo.co menjelaskan bahwa PT Bumi Resources, PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) memanipulasi laporan penjualan mereka sehingga menyebabkan kerugian bagi negara sebesar US\$ 620,49 juta. Kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak mencapai hingga US\$ 477,29 juta. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, total tunggakan pajak mencapai sekitar RP 51 triliun karena adanya pelaporan yang tidak benar dan kasus penggelapan pajak.

Pajak merupakan salah satu alasan mengapa terjadi manajemen laba bagi perusahaan. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan salah satu elemen biaya yang dapat mengurangi laba bagi perusahaan dimana semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan maka akan semakin sedikit laba yang akan diperoleh perusahaan sehingga muncul tindakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan.

Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian mengenai tindakan manajemen laba, salah satunya adalah Gede dan Suputra (2016) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara signifikan mampu mendeteksi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk menghindari kerugian dan memperoleh keuntungan. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul “PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA”. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 – 2019).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 2017-2019?
- b. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 2017-2019?
- c. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 2017-2019?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh beban pajak dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada: kepada peneliti, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba; kepada pembaca, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu menjadi suatu acuan yang baik dalam hal kelanjutan mengani penelitian ini.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN RUMUS HIPOTESA

Teori Agensi

Teori Agensi (*agency theory*) merupakan suatu teori yang menjadi dasar terhadap hubungan antara pemilik (*principle*) dan manajemen (*agent*) dengan anggapan bahwa setiap pihak termotivasi untuk kepentingan nya masing-masing (Anthony & Govindarajan, 2005). Di dalam teori keagenan, *principle* merupakan para

pemegang saham dan pemilik yang memberikan fasilitas untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Sedangkan *agent* merupakan pihak manajemen yang mempunyai suatu kewajiban untuk mengendalikan perusahaan sesuai dengan apa yang sudah dilimpahkan oleh para *principle* (Fery & Anna, 2014).

Stella (2015) menjelaskan bahwa pemilik dan pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada manajemen dengan tujuan untuk mengelola perusahaan. Hal ini diasumsikan bahwa pemilik dan pemegang saham hanya fokus dan tertarik pada pengembalian keuangan yang didapatkan karena sudah berinvestasi pada perusahaan.

Manajemen Laba

Schipper (1989) dalam Kusuma (2006) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan dan menurunkan perolehan laba dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan dengan maksud untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri. Manajemen dapat diasumsikan akan memperoleh kepuasan bukan hanya dari kompensasi keuangan melainkan dari pertambahan lainnya yang melibatkan hubungan keuangan. Dari asumsi tersebut, manajer dapat mengambil kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen yaitu dengan melakukan perekrayaan terhadap laporan keuangan seperti memoles laba atau sering disebut dengan manajemen laba (Stella, 2015).

Beban Pajak Tangguhan

Menurut Yulianti (2005) beban pajak tangguhan merupakan beban yang muncul karena adanya ketidaksamaan temporer antara laba akuntansi (laba pada laporan keuangan untuk pihak eksternal) dan laba fiskal (laba yang dipakai untuk perhitungan pajak). Philips, Pincus & Rego (2003) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa beban pajak tangguhan mampu mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk mencegah kerugian.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, beban pajak sudah diatur sedemikian rupa dimana beban pajak itu sendiri sudah dibagi sesuai dengan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan dari waktu pengakuan biaya dalam laba akuntansi dan laba fiskal. Dari perbedaan inilah akan muncul biaya dan juga pendapatan pajak tangguhan yang terdapat di laporan keuangan perusahaan. Perbedaan permanen merupakan perbedaan yang memiliki sifat tetap, dimana sifat itu tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Sehingga perbedaan permanen ini tidak menimbulkan biaya dan juga pendapatan

pajak tangguhan. Perbedaan permanen ini muncul karena adanya penghasilan yang tidak termasuk ke dalam obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak secara final.

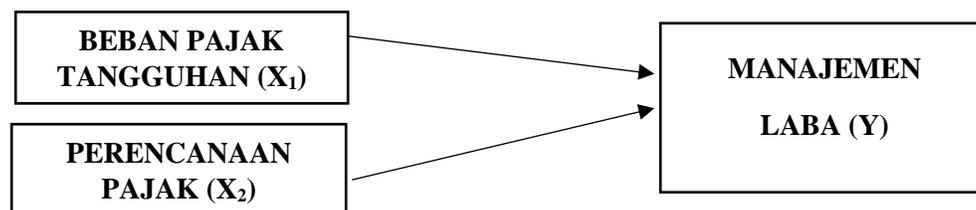
Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan atau tindakan penghematan pembayaran pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku (Suandy, 2008). Mengatur jumlah laba yang akan di laporkan merupakan salah satu cara dalam perencanaan pajak sehingga mampu dikategorikan dalam indikasi operasi manajemen laba. Pajak termasuk salah satu bagian dari pengurang laba, sehingga besarnya jumlah pajak yang disetor dilihat dari besarnya jumlah penghasilan.

Budi & Harnovinsah (2015) mengemukakan bahwa ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan dan menekan jumlahnya, yakni: 1) *Tax Avoidance*, yaitu dilakukan dengan cara menghindari pajak secara resmi atau legal sehingga aman untuk dilakukan karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. 2) *Tax Saving*, yaitu dilakukan untuk penghematan pajak dengan menggunakan cara yang resmi atau legal dan aman karena tidak bertentangan dan melanggar ketentuan perpajakan. 3) *Tax Evasion*, merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara tidak resmi atau illegal yang melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga dari ketiga hal diatas, *tax avoidance* dan *tax saving* merupakan cara-cara yang baik untuk melakukan perencanaan perpajakan karena tidak bertentangan dan tidak melanggar undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Olahan Penulis

Dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijadikan sebagai hipotesis penelitian dimana peneliti ingin menguji dan mengetahui pengaruh dari beban pajak

tanggungan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Dimana variabel X terdiri dari beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak, sedangkan variabel Y adalah manajemen laba.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba

Harnanto (2003) menyatakan bahwa penggunaan beban pajak tanggungan dapat mengetahui manajemen laba yang akan digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi 2 tujuan, yakni: 1) bertujuan dalam penghindaran penurunan laba dan 2) untuk menghindari terjadinya kerugian. Hasil dari penelitian yang dilakukan Astutik (2016) menyatakan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba.

H₁: Beban Pajak terhadap Manajemen Laba

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Menurut Astutik (2016) pihak manajemen biasanya termotivasi melakukan tindakan manajemen laba seperti mengurangi beban pajak dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan sehingga memiliki jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Hasil dari penelitian Fitriany (2016) dan Astutik (2015) menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila semakin baik dilakukannya perencanaan pajak maka manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan tersebut juga akan semakin baik.

H₂: Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Pengaruh Beban Pajak Tanggungan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Yin & Cheng (2004) menyatakan bahwa manajemen laba suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan apabila mempunyai hubungan yang signifikan terhadap insentif pajak dan insentif non pajak. Sedangkan apabila manajemen laba suatu perusahaan itu memiliki hubungan hanya dengan insentif non pajak saja, maka akan mengalami suatu kerugian. Mereka juga memiliki pendapat yaitu apabila perusahaan yang membatasi perencanaan pajaknya maka mereka mengurangi jumlah pembayaran pajak dari yang seharusnya.

Ningsih (2017) menyatakan bahwa jika perusahaan semakin baik dalam melakukan perencanaan pajak maka manajemen laba dari perusahaan itu juga akan semakin baik, sehingga dia menyimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Ningsih (2017) juga menyatakan bahwa beban pajak dengan jumlah yang kecil tidak menentukan adanya manajemen laba yang

dilakukan oleh pihak perusahaan karena kecilnya jumlah beban pajak tangguhan bisa terjadi karena ada nya penurunan laba. Beban pajak tangguhan dianggap kurang efektif untuk mengetahui apakah pihak perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak. Sehingga hasil dari penelitan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2016) yang mengatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

H₃: Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mencakup penemuan masalah pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan periode 2017-2019 perusahaan tekstil dan garment pada Bursa Efek Indonesia.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada periode 2017-2019. Sampel yang dipilih untuk pengambilan data adalah metode *purposive sampling* yaitu penentuan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Penulis melakukan penetapan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2017-2019.
- c. Perusahaan yang menampilkan keseluruhan data informasi yang lengkap.
- d. Perusahaan subsector manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 20 perusahaan, yaitu:

Tabel 3.1
Daftar Nama Perusahaan

NO	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
1	ARGO	Argo Pantes Tbk
2	BELL	Trisula Textile Industries Tbk
3	CNTX	Century Textile Industry Tbk
4	ESTI	Ever Shine Tex Tbk
5	ERTX	Eratex Djaya Tbk
6	HDTX	Panasia Indo Resources Tbk
7	INDR	Indo Rama Synthetic Tbk

8	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk
9	PBRX	Pen Brothers Tbk
10	POLU	Golden Flower Tbk
11	POLY	Asia Pasific Fibers Tbk
12	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
13	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk
14	SSTM	Sunson Tectile Manufacturer Tbk
15	STAR	Star Petrochem Tbk
16	TFCO	Tificio Fiber Indonesia Tbk
17	TRIS	Trisula International Tbk
18	UCIT	Uni-Charm Indonesia Tbk
19	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
20	ZONE	Mega Perintis Tbk

Sumber : www.idx.co.id

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, dimana variabel independen nya adalah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak, sedangkan variabel dependen nya adalah manajemen laba.

Variabel Independen (X):

Beban Pajak Tangguhan. Variabel beban pajak tangguhan (X_1) diukur dengan jumlah beban pajak tangguhan yang di bagi dengan total aset pada tahun sebelumnya.

$$BPTit = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Aset} - 1}$$

Keterangan:

BPTit: Beban Pajak Tangguhan perusahaan i pada tahun t

Perencanaan Pajak. Variabel perencanaan pajak (X_2) diukur dengan jumlah *net income* yang di bagi dengan *pretax income*.

$$TRRit = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

TRRit: Tax Retention Rate perusahaan i pada tahun t

Variabel Dependen (Y)

Manajemen Laba. Variabel manajemen laba (Y) diukur dengan *discretionary accruals*, dimana ini merupakan model yang dimodifikasi oleh Jones. *Discretionary accruals* dapat dihitung dengan hasil pembagian dari total *accruals* (TA) dan total aset kemudian dikurangkan dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$DAit = \frac{TACit}{Ait - 1} - NDAit$$

Keterangan:

DAit : *Discretionary accruals*

TACit : Total *accruals* perusahaan i pada tahun t

Ait - 1 : Total asset perusahaan i pada tahun t

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BPT	40	.00	.21	.0189	.03795
TRR	40	.00	3.38	.8124	.53813
ManajemenLaba	40	.01	.15	.0581	.02781
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Output SPSS 25 yang diolah oleh penulis.

Tabel diatas menunjukkan bahwa manajemen laba pada periode 2017-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0581, nilai minimum sebesar 0.01 dan nilai maksimum sebesar 0.15. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0.02781. Variabel beban pajak tangguhan pada periode 2017-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0189, nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 0.21. Sedangkan nilai standar deviasi nya sebesar 0.3795. Variabel perencanaan pajak pada periode 2017-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.189, nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 3.38. Sedangkan nilai standar deviasi nya sebesar 0.53813.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dari table diatas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat bahwa Asymp Sig. (2-tailed) lebih besar

dari 0,05 yaitu 0,113, sehingga sesuai dengan ketentuan dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov maka data berdistribusi normal dan lolos uji normalitas. Table uni normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02576309
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.073
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.113

Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS yang diolah oleh penulis

Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstd Beta	Coeff	Std. Error	Coeff. Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	.046	.008		5.581	.000			
Beban Pajak Tangguhan	.262	.113	.358	2.328	.025	.982	1.018	
Perencanaan Pajak	.009	.008	.176	1.145	.259	.982	1.018	

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Output SPSS yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari uji multikolinearitas yang menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak melebihi nilai 10 ($VIF < 10$) dan nilai dari *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0,1 ($Tolerance > 0,1$). Sehingga dapat disimpulkan hasil dari tabel diatas, bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Correlations

		SQRT_X1	SQRT_X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	-.322*	-.459**
	Sig. (2-tailed)	.	.073	.093
	N	40	40	40
X24	Correlation Coefficient	-.322*	1.000	.101
	Sig. (2-tailed)	.043	.	.535
	N	40	40	40
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.459**	.101	1.000
	Sig. (2-tailed)	.003	.535	.
	N	40	40	40

*. Correlation is sig. at the 0.05 level (2-Tailed)

**. Correlation is sig. at the 0.01 level (2-Tailed).

Sumber: Output SPSS yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Beban Pajak Tangguhan (X1) sebesar 0.093 dan nilai signifikansi variabel Perencanaan Pajak (X2) sebesar 0.535. Karena nilai dari variable Beban Pajak Tngguhan Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.377 ^a	.242	.196	1.02645	1.844

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Output SPSS yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil output tabel uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson* pada tabel diatas dengan nilai 1,844. Menurut nilai dari table D-W, $dl = 1,20$ dan du

=1,40, sehingga uji autokorelasi memiliki syarat $du < D-W < 4-du$ maka diketahui bahwa $1,40 < 1,844 < 2,6$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat untuk melakukan pengujian regresi dan menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.015	.014		1.082	.286
	X1	-.054	.050	-.174	-1.073	.290
	X2	-.011	.013	-.131	-.806	.425

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Ouputs SPSS yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil tabel output Uji T diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel Beban Pajak Tangguhan (X1) sebesar 0.290. Karena nilai signifikansi beban pajak tanggungan lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak ada pengaruh dalam hubungan antara beban pajak tanggungan dengan manajemen laba. Pada perencanaan pajak, memiliki nilai signifikansi sebesar 0.425 yang artinya tidak ada pengaruh pada perencanaan pajak secara parsial terhadap manajemen laba. Kedua variabel independen yaitu beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Uji F

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi sebesar 0.460 maka beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak diterima atau dapat dikatakan dengan koefisien regresi signifikan. Hal ini juga menunjukkan nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $3.794 > 3.23$ maka variabel independent diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara beban pajak tanggungan dan perencanaan paak terhadap manajemen laba.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	2	.001	3.794	.460 ^a
	Residual	.025	37	.001		
	Total	.026	39			

a. Predictors: (Constant), SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Output SPSS yang diolah oleh penulis

PEMBAHASAN

Pengaruh Beban Pajak Tanggahan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan pada hasil uji t beban pajak tanggahan yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi nya sebesar 0.295 yang artinya variabel independen beban pajak tanggahan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba karena berada diatas taraf signifikan 0.05. Sehingga hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Philips, Pincus & Rego (2003) yang menyatakan bahwa beban pajak tanggahan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Budi & Harnovinsah (2014) berbanding terbalik yang menyatakan bahwa beban pajak tanggahan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan pada hasil uji t perencanaan pajak yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi nya sebesar 0.425 yang artinya variable perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba karena berada diatas taraf signifikan 0.05. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Astutik (2016) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Pengaruh Beban Pajak Tanggahan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan pada hasil uji F menunjukkan bahwa hasil signifikansi dari beban pajak tanggahan yang dihitung menggunakan rumus BPTit dan perencanaan pajak yang dihitung dengan rumus TRR (*Tax Retention Rate*) memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reza, Ketut & Haqi (2017) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat mendeteksi ada nya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitan dan pembahasan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan data yang diperoleh dari 20 perusahaan subsektor manufaktur, maka kesimpulan yang dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan subsector manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
- b. Perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan subsrctor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
- c. Berdasarkan hasil uji secara simultan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan subsector manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mampu memperluas dan memperbanyak jumlah dari perusahaan yang akan digunakan sebagai objek dari penelitian misalnya tahun pengamatan yang mungkin lebih panjang seperti periode selama lima tahun dan juga menambah variabel independen lainnya untuk mampu mendeteksi adanya perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Serta peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti perusahaan nonmafktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar tidak hanya melakukan peneltian terhadap perusahaan manufaktur saja.

DAFTAR PUSTAKA

A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G Dharma Suputra (2016), *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)* Skripsi, Bali Universitas Udayana

- Anthony, R.N dan Govindarajan. (2005). *Management Control System*, Salemba Empat, Jakarta.
- Aditama, Ferry dan Anna Purwaningsih. (2014). *Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. MODUS Vol. 26 (1).
- Astutik, R.E.P, & Mildawati, T. (2016). *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi ,5(3), 1-17.
- Budi Setyawan dan Harnovinsah. (2015). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*.
- Erly Suandy. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Empat.
- Fitriany, L.C. (2016). *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2011-2013)*. Jom Fekon 3(1).
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Kusuma, Hadri. (2006). *Dampak Manajemen Laba terhadap Relevansi Informasi Akuntansi Bukti Empiris dari Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8 (1), hal. 1-12
- Ningsih, F.C. (2017). *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Philips, J.D., Pincus, M., & Regno, S.O. (2003). *Earnings Managemnet: New Evidence Based On Deferred Tax Expense*. The Accounting Review. 78 (2), 491-521.

- Reza, H.D.K.P., Ketut, S., Haqi F. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*.
- Stella Mettawidya. (2015). *Analisis Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Asimetri Informasi, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2012*. JOM FEKON Vol 2 No. 1.
- Yin, Q.J. & Cheng S.A. (2004). *Earnings Management of Profit Firms and Loss Firms in Response to Tax Rate Reductions*. Review of Accounting & Finance, 3,67-92.
- Yulianti. (2005). *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

**PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TAHUN
SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2019)**

Matthew¹
Lorina Siregar Sudjiman²

***Abstrak.** Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mencari tahu pengaruh pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern. Sampel penelitian ini didapatkan dengan penggunaan metode purposive sampling dengan fokus perusahaan sub sektor makanan dan minuman, yang listing di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2017-2019. Penelitian dilakukan dengan data keuangan dari 22 perusahaan dan dengan pengamatan sejumlah 66 sampel penelitian. Penelitian dilakukan dengan pemanfaatan teknik analisis regresi logistik. Penelitian ini mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Namun variabel opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.*

***Keywords:** Opini audit going concern, Pertumbuhan perusahaan, dan Opini audit tahun sebelumnya*

PENDAHULUAN

Setiap laporan keuangan yang dirilis oleh emiten wajib disertai dengan adanya lampiran bukti bahwa sudah dilakukan audit terhadap laporan keuangan emiten. Hal ini merupakan ketentuan yang patut diterapkan bagi semua perusahaan yang sudah listing dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Maksud dari laporan keuangan adalah sebagai informasi atas kinerja perusahaan pada setiap periode yang berisi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat digunakan bagi setiap pihak yang membutuhkan seperti *stakeholder*, *stockholder*, maupun untuk umum. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan umumnya dilakukan oleh auditor yang mempunyai kompetensi dan independensi sehingga hasil audit atas laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Setiap Auditor mempunyai wewenang dan diharuskan untuk menilai laporan keuangan sebuah perusahaan dengan cara memberi opini atas laporan keuangan tersebut.

Opini audit *going concern* merupakan salah satu dari beberapa opini yang biasanya diberikan oleh auditor. Opini *going concern* akan diberikan untuk menyatakan keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tentu hal ini berlaku untuk kasus sebaliknya, jika auditor yakin akan kelangsungan hidup sebuah perusahaan maka akan diberikan opini non *going concern* (Purba & Nazmel, 2018). Opini *going concern* merupakan informasi yang krusial bagi para *stakeholder*, *stokeholder*, maupun pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan sehingga para pemangku kepentingan tersebut dapat menentukan keputusannya berdasarkan opini yang dikeluarkan oleh auditor. Pihak bank atau kreditur tentu akan memiliki keraguan untuk memberikan kredit kepada perusahaan yang diragukan kelangsungan hidupnya, hal ini merupakan dampak dari penerimaan opini *going concern*.

Kebutuhan perusahaan untuk tetap hidup atau bertahan adalah dengan tetap berjalannya kegiatan operasional berupa penjualan sehingga perusahaan memiliki pendapatan dan pendapatan tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatan operasional. Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan suatu entitas untuk memberikan tanda bahwa perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan (Purba D. H., 2017). Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari pertumbuhan laba maupun pendapatan perusahaan. Jika laba bertumbuh maka pendapatan pun akan ikut bertambah sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan akan dapat melangsungkan kegiatan usahanya (Paramitha, Gunawan, & Purnamasari, 2016). Arah pertumbuhan perusahaan yang relatif positif dapat menjadi tanda bahwa perusahaan sedang dalam kondisi baik dan *auditee* cenderung akan mendapat opini non *going concern* dari auditor.

Kegiatan perusahaan pada tahun ini tentu tidak dapat terlepas dari kondisi perusahaan tahun sebelumnya. Jika terjadi masalah perusahaan cenderung tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu yang singkat sehingga akan adanya pengaruh keadaan perusahaan tahun sebelumnya dengan kondisi tahun berjalan. Laporan audit tahun sebelumnya adalah adalah opini yang diterima oleh *auditee* pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum dilakukan penelitian. Opini audit *going concern* tahun sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberian opini *going concern* pada tahun berjalan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rito, Huda, & Subaki, 2020)

Dalam surat kabar daring (Situmorang, 2020) mengulas mengenai masalah yang ada pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang menunjukkan penurunan penjualan pada tahun 2018 dan menjadi penyebab penurunan terhadap pendapatan yang memunculkan keraguan akan kelangsungan hidup akan perusahaan, sehingga

mendapat opini going concern dari auditor. Tidak berhenti sampai disitu hal tersebut berdampak pada penerimaan opini perusahaan pada tahun 2019, yaitu mendapat opini *going concern*. Hal ini dikarenakan tidak mudah untuk melakukan perbaikan pada perusahaan yang mengalami masalah sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam waktu cepat. Penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan makanan dan minuman dikarenakan perusahaan di sub sektor ini cukup banyak sehingga diasumsikan memiliki data yang beragam. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menjadi skeptis dan ingin melakukan penelitian terkait pengaruh pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*.

KAJIAN TEORI

Teori agensi

Para pemegang saham atau pemilik perusahaan selaku *principal* akan mempercayakan perusahaannya dikelola oleh pihak manajemen selaku *agent*. Dalam praktiknya kedua pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing yang ingin dicapai, sehingga tidak jarang adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan ini terjadi karena adanya keterkaitan antara *agent* dan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Untuk mencegah timbulnya asimetri informasi diperlukan pengawasan lebih oleh pihak yang independen yaitu auditor sehingga dapat dipercaya terkait informasi yang ada.

Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan adalah perusahaan yang bisnisnya menghasilkan pendapatan positif yang secara signifikan dan lebih cepat dari perekonomian secara keseluruhan (Chen, 2021). Pertumbuhan perusahaan dapat dinilai dari rasio pertumbuhan laba yang positif, hal ini menandakan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam persaingan usaha. Pertumbuhan perusahaan dapat dicapai apabila laba yang diperoleh perusahaan dapat memadai secara terus-menerus (Sumarna, 2016).

Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini yang diberikan auditor ke pada auditee pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum dilakukannya penelitian. Opini audit *going concern* akan cenderung diterbitkan auditor jika *auditee* pada tahun sebelumnya menerima opini yang serupa (Melati Putri, 2016). Opini audit tahun sebelumnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu opini audit *going concern* dan opini audit *non going concern*.

Opini Going Concern

Going concern adalah kelangsungan hidup dan merupakan asumsi dalam laporan keuangan suatu entitas (Ramadhani & Sulistyowati, 2020). Sedangkan opini *going concern* merupakan opini audit dengan modifikasi *going concern* yang diberikan auditor karena timbulnya keraguan terhadap pihak *auditee* (Wulandari & Nuryana, 2018). Dalam melakukan audit laporan keuangan tahunan salah satu hal penting yang harus diputuskan auditor adalah menentukan apakah perusahaan dapat melangsungkan hidupnya atau tidak (Widoretno, 2019).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini *Going Concern*

Pertumbuhan perusahaan diukur dengan peningkatan volume penjualan tahun ini dari tahun sebelumnya, perusahaan yang baik dan dalam kategori aman adalah perusahaan yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara tersebut (Purnamasari, Paramitha, & Gunawan, 2016). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nur, Putra, & Anwar, 2016) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap opini *going concern*, oleh karena itu penulis ingin menguji kembali ada atau tidaknya pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap opini *going concern*

H1: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*

Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini *Going Concern*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hati & Roslini, 2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan *auditee* yang mendapatkan opini *going concern* biasanya mempunyai masalah keuangan yang fatal, sehingga jika tidak dapat ditanggulangi dapat memperbesar kemungkinan penerimaan opini *going concern* di tahun yang akan datang.

H2: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan berupa pertumbuhan perusahaan dengan tolak ukur penjualan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya yang tercantum bagian pada

opini audit. Data tersebut diambil dari laporan keuangan perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses secara daring melalui www.idx.com.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sub sektor makanan dan minuman periode 2017-2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam metode pengambilan data. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkanlah 22 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan tahun jumlah tahun penelitian sebanyak 3 tahun, sehingga banyaknya sampel data observasi berjumlah 66. Adapun kriteria penentuan sampel sebagai berikut:

No	Kriteria Sample	Jumlah Sample
1	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI	31
2	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama periode 2017-2019	9
	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	22
	Data observasi selama 3 periode	66

Sumber: idx.co.id, data diolah kembali oleh penulis, 2021

Definisi Operasional

Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan pertumbuhan laba entitas dengan cara membandingkan laba entitas pada satu tahun sebelumnya dengan laba perusahaan satu tahun setelahnya (Nur, Putra, & Anwar, 2016). Maka pertumbuhan perusahaan dapat diukur menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan perusahaan} = \frac{\text{Penjualan bersih } t - \text{penjualan bersih } (t-1)}{\text{Penjualan bersih } (t-1)}$$

Dimana:

Penjualan bersih_t = penjualan bersih tahun sekarang

Penjualan bersih_(t-1) = penjualan bersih tahun lalu

Opini Audit Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur opini audit tahun sebelumnya, penulis menggunakan *variable dummy*, dimana perusahaan yang menerima opini *going concern* pada tahun sebelumnya akan diberi nilai 1 sedangkan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mendapat opini *going concern* pada tahun sebelumnya.

Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Model analisis data ini dilakukan dengan bantuan software SPSS. Persamaan dari regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Log} = \frac{p}{1-p}\alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2$$

Explanation:

$$\text{Log} \frac{p}{1-p} = \text{GCAO (Going Concern Audit Opinion)}$$

α = Constant

β_1, β_2 = Regression coefficient

X1 = Pertumbuhan Perusahaan

X2 = OATS (Opini Audit Tahun Sebelumnya)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menitikberatkan pada hasil statistic deskriptif, uji kelayakan regresi, dan regresi logistik.

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Perusahaan	66	-.702	1.038	.06804	.219861
Opini Tahun Sebelumnya	66	0	1	.44	.500
Opini Going Concern	66	0	1	.59	.495
Valid N (listwise)	66				

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui deskripsi dari data variabel seperti mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Dari tabel diatas dapat diketahui deskripsi statistik tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

ini. Seperti pada variabel pertumbuhan perusahaan memiliki jumlah data sebanyak 66, nilai minimum -0.702, nilai maksimum 1.038 dan standar deviasi 0.219. Dan begitupun untuk variabel lainnya.

Uji Kelayakan Regresi

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	9.864	7	.196

Dari tabel output SPSS *Hosmer dan Lemeshow test* diatas terlihat bahwa nilai sig sebesar 0.196. Nilai tersebut lebih besar dari alpha penelitian ($0.196 > 0.05$). Maka dengan jelas dapat disimpulkan bahwa model sudah cocok dengan data observasi, sehingga model regresi logistik ini layak untuk digunakan ke tahap selanjutnya.

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 0 1	89.302	.364
2	89.301	.368
3	89.301	.368

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 89.301

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	81.961 ^a	.105	.142

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Dari tabel diatas terlihat bahwa -2 Log likelihood mengalami penurunan dari step 0 (89.301) ke step 1 (81.961). Artinya model regresi logistik yang terbentuk lebih baik.

Terlihat juga nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.142 yang artinya besaran pengaruh dari variabel bebas (Pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya) terhadap variabel terikat (Opini audit *going concern*) adalah sebesar 14.2%

Regresi Logistik

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step X1	-2.636	1.636	2.595	1	.107	.072
1 ^a X2	.850	.546	2.421	1	.120	2.340
Constant	.213	.375	.321	1	.571	1.237

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2.

Dari tabel diatas, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$GOAC = 0.213 + (-2.636) PT + 0.850 OATS$$

Hasil dari regresi logistic menunjukkan bahwa nilai signifikan pertumbuhan perusahaan sebesar 0.107. Angka tersebut lebih besar dari alpha penelitian ($0.107 > 0.10$). Artinya secara parsial pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi secara signifikan. terlihat nilai signifikan untuk variabel opini audit tahun sebelumnya sebesar 0.120. Angka tersebut lebih besar dari alpha penelitian ($0.120 > 0.10$). Artinya secara parsial opini audit tahun sebelumnya juga tidak mempengaruhi secara signifikan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern

Berdasarkan hasil statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama ditolak dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang menunjukkan nilai -2.636 pada variabel pertumbuhan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mulya & Andini, 2015) yang menunjukkan bahwa

tidak adanya pengaruh signifikan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit *going concern*.

Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern

Hasil dalam tabel *Variables in the Equation* dapat dilihat bahwa koefisien regresi menunjukkan nilai 0.85. Dalam hal ini artinya hipotesis dua diterima di mana opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Koefisien positif menunjukkan jika perusahaan menerima opini audit *going concern* maka besar kemungkinan perusahaan akan mendapatkannya juga di tahun setelahnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Harris & Meiranto, 2015) yang menunjukkan adanya pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan perusahaan terhadap opini *audit going concern*. Namun jika sewaktu-waktu koefisien pertumbuhan perusahaan memiliki nilai yang lebih rendah lagi maka akan memperbesar kemungkinan sebuah emiten mendapat opini *going concern*. Namun untuk variabel opini audit tahun sebelumnya justru menunjukkan adanya pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Artinya perusahaan yang menerima opini *audit going concern* ditahun sebelumnya kemungkinan besar akan mendapat opini yang serupa di tahun mendatang.

Saran

Dalam penelitian ini penulis dapat memberi saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel yang di uji sehingga dapat menambah referensi dan hasil yang lebih bervariasi. Bagi perusahaan, supaya dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan menghindari opini *going concern* sehingga tidak terjadinya keraguan bagi para investor atau pemilik kepentingan lainnya.

Daftar Pustaka

Chen, J. (2021, February 23). *Growth Company*. Retrieved from investopedia.com: <https://www.investopedia.com/terms/g/growthcompany.asp>

- Hati, I. P., & Roslini, I. (2017). Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Kondisi Keuangan terhadap Opini Audit Going Concern. *Journal of Applied Accounting and Taxation Vol. 2, No. 2*, 123-133.
- Harris, R., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Debt Default, Disclosure, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Diponegoro Journal of Accounting, 4(4)*, 298-308.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3*, 305-360.
- Melati Putri, C. (2016). Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern. 1-17.
- Mulya, A. A., & Andini, P. (2015). Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Dan Debt Default Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI Periode 2010-2014). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 2*, 202-2019.
- Nur, T., Putra, D. A., & Anwar, A. S. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Rivi Akuntansi dan Keuangan Vol.6 No.1*, 857-864.
- Paramitha, I. K., Gunawan, H., & Purnamasari, P. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Reputasi KAP Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Prosiding Akuntansi Volume 2, No.2*, 831-836.
- Purba, D. H. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Dan Kebijakan Struktur Modal Terhadap Pertumbuhan Harga Saham Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di BEI. *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* , 1-13.
- Purba, S. F., & Nazmel, N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Rasio Keuangan, Dan Kualitas Auditor Terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 5 Nomor. 2*, 199-214.

- Purnamasari, P., Paramitha, I. K., & Gunawan, H. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Reputasi KAP Terhadap Penerimaan Opini Going Concern (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2015). *Prosiding Akuntansi Volume 2, No.2*, 831-836.
- Ramadhani, F. T., & Sulistyowati, W. A. (2020). Detection Of Going Concern Audit Opinion Based On Disclosure, Financial Condition AND Opinion Shopping. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 8, No 1*, 75-84.
- Rito, Huda, I., & Subaki, A. (2020). Analisis Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Debt Default, Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 111-122.
- Situmorang, R. T. (2020). *Terancam Delisting, Bagaimana Akhir Drama Tiga Pilar Sejahtera (AISA)* Jakarta: bisnis.com.
- Sumarna, A. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perusahaan. *Jurnal Benefita 1(2)*, 48-57.
- Widoretno, A. A. (2019). Factors That Influence The Acceptance of Going Concern Audit Opinion Manufacture Companies. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges Vol. 2, No. 1*, 49-57.
- Wulandari, R., & Nuryana, I. (2018). Opinion Analysis Going Concern Through Auditor Quality And Auditor Experience. *Jurnal Jibeka Volume 12 NO 1*, 65-73.

PENGARUH PROFITABILITAS DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Helentina¹, Harman Malau²

Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

Email : sitohanghelentina@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine wheter there is an influence between Profitability and Good Corporate Governance on Tax Management. The research population is banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019, which where taken as many as 23 companies as samples. The data used by the researchers as the basis of analysis in this study is secondary data. The analysis technique used by the researchers is multiple linear regression analysis. The result of the study show that Profitability and Good Corporate Governance have no significant effect on tax management.*

Keywords: *Profitability, Good Corporate Governance, Tax Management*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Kondisi tanah dan sumberdaya alam yang melimpah membuat banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mendapat banyak keuntungan dari sektor perpajakan. Salah satunya yang menjadi pendapatan terpenting didapat dari yaitu penerimaan pajak penghasilan badan. Undang-undang wajib pajak mengharuskan perusahaan membayar pajak. Jika perusahaan tidak membayar pajak, maka perusahaan menghadapi sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Bagi pelaku usaha, pajak merupakan beban yang mengurangi jumlah keuntungan yang mereka terima dan memungkinkan mereka untuk membayar beban pajak minimum (Al-Ahsan dan Setiawan, 2016). Pemerintah berusaha mendapatkan penerimaan pajak paling banyak dari masing-masing perusahaan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang berusaha membayar pajak minimum agar perusahaan memperoleh keuntungan yang paling banyak. Mengingat adanya perbedaan permintaan antara pemerintah dan dunia usaha, hal ini memungkinkan para pengusaha menerapkan manajemen pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang mereka bayarkan.

Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Hal itu mengakibatkan adanya selisih kepentingan antara fiskus dengan perusahaan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar, sedangkan perusahaan juga

menginginkan pembayaran pajak yang sangat minimal kepada negara, sehingga menimbulkan keinginan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak supaya dapat memaksimalkan laba dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen perpajakan dapat disebut sebagai cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Karayan dan Hanum (2013), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajak yaitu dengan melihat tarif pajak efektifnya. Nilai tarif pajak efektif merupakan sebuah bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung pada perusahaan. Untuk dapat melakukan penghematan pajak secara legal, perusahaan dapat melakukannya melalui manajemen pajak. Akan tetapi perlu diketahui legalitas manajemen pajak tergantung berdasarkan instrumen yang digunakan. Legalitas hanya dapat diketahui secara pasti setelah mendapat putusan dari pengadilan.

Tujuan fundamental bisnis perbankan yaitu mendapatkan keuntungan tinggi dengan memberikan layanan jasa keuangan kepada jasa *customer*-nya (Akbar, 2019). Investor berhak mendapatkan keuntungan dari bank melalui peningkatan nilai investasi serta dividen yang diberikan dari perusahaan. Peningkatan nilai investasi tersebut dapat diwujudkan melalui adanya peningkatan kinerja profitabilitas bank.

Disisi lain manajemen pajak dan profitabilitas yang harus dikelola dengan baik, *Good Corporate Governance* (GCG) atau biasa disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik pun perlu diperhatikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), mengatakan bahwasanya krisis yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan *good corporate governance*. Seperti yang diketahui bahwa penerapan *good corporate governance* didasarkan pada teori agensi, yang menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik.

Sektor jasa keuangan merupakan sektor ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbangkan pajaknya kepada negara (Poskota, 2019). Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perusahaan sektor jasa keuangan dapat disebut sebagai penyumbang terbesar ke-tiga di Indonesia melalui perusahaan sub sektor jasa keuangan perbankan.

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tarif pajak efektif atau biasa disebut (CTER). Tarif pajak efektif dapat dilihat dari *cash flow* atau laporan arus kas, sehingga kita dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan. Menurut (Armadi, 2015), tarif pajak efektif adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Tarif pajak efektif merupakan sebuah penyajian besaran pada tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dapat dihitung atau dinilai berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan

oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan suatu bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.

Penelitian ini berfokus kepada dua Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak yaitu profitabilitas dan *good corporate governance*. Berdasarkan pendahuluan dan penelitian terdahulu, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul: “Pengaruh Profitabilitas dan *Good Corporate Governance*, Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Perbankan Tahun 2017-2019”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Manajemen Pajak

Menurut (Darmadi, 2013), Manajemen Pajak atau bisa disebut dengan Pengelolaan perpajakan adalah pengelolaan kewajiban pajak dengan menggunakan strategi untuk pengurangan total beban pajak. Sedangkan menurut (Melinda, 2013), Manajemen Pajak merupakan cara yang baik bagi perusahaan dalam hal mengenai pembayaran pajak mulai dari pelaksanaan, pengadilan, dan perencanaan. Manajemen pajak adalah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang bagus, dimana profit yang tinggi disuatu perusahaan dapat meningkatkan pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut (Nurjanah, Diatmika, Yasa, 2017).

Maka dari itu peneliti menggunakan tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak. Manajemen pajak dapat diukur dengan GAAP ETR. Berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku, GAAP ETR adalah tarif pajak efektif. Pada penelitian ini maka digunakan rumus:

$$GAAP ETR = \frac{Beban Pajak}{Pendapatan Sebelum Pajak}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah tingkat usaha perusahaan dalam mendapatkan laba dari penjualan, modal sendiri maupun total aktiva. Dengan begitu para investor akan sangat mementingkan analisis profitabilitas ini. Pada contohnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang akan diterima dalam bentuk dividen, (Sartono, 2012).

(Irham Fahmi, 2015) dalam (Yogi, 2018) menyatakan bahwa rasio Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang dapat dilihat melalui besar kecilnya tingkat keuntungan yang didapat melalui penjualan maupun investasi. Maka semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik pula dalam kemampuan menghasilkan tingginya perolehan laba perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Good Corporate Governance

Konsep *Good Corporate Governance* sudah pasti merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan *value added* untuk semua *stakeholder* (*Good Corporate Governance, 2021*). Ada dua hal penting dalam konsep ini. Yaitu yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan akurat dan tepat pada waktunya. Hal penting kedua dari konsep ini yaitu, kewajiban perusahaan untuk melakukan *disclosure* atau pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan terbuka kepada seluruh informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*.

Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan salah satu bagian terpenting dalam *good corporate governance* di perbankan dan komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut (Sunardi, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian dari kutipan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu proses, seperangkat peraturan, dan sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Khususnya dalam arti kecil, hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham demi tercapai tujuan organisasi. Sehingga dalam penelitian ini untuk mengukur *Good Corporate Governance*, peneliti mengambil rumus:

$$KOI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Hipotesis

Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan. Salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka performa perusahaan tersebut juga akan semakin bagus. Di dalam pajak, hal ini dijadikan awal pengenaan pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Dimana semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia dan Visca, 2020) menyatakan yaitu Profitabilitas memiliki

pengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

H₁: Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. *Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak*

Upaya perusahaan sektor keuangan memiliki kinerja keuangan yang berkesinambungan, dapat melindungi kepentingan pelanggannya. Maka dari itu sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan dengan baik penerapan *Good Corporate Governancenya* (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fariski dan Hesti, 2019) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

H₂: *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitiannya di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diambil melalui laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2019 yang di akses melalui website <https://www.idx.co.id/>.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak mengambil keseluruhan data populasi perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sehingga penulis hanya mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) data perusahaan perbankan untuk dijadikan sebagai sampel. Periode yang diteliti pada penelitian ini diambil dari tahun 2017-2019. Sehingga total data yang diperoleh dari 23 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 (tiga) tahun yaitu berjumlah 69 data laporan keuangan yang dijadikan sebagai sample penelitian ini.

Perusahaan perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu : AGRO, AGRS, ARTO, BABP, BACA, BBKA, BBHI, BBKP, BBMD, BBNI, BBRI, BBTN, BBYB, BNII, BDMN, BNLI, BGTG, BINA, BJBR, BJTM, BKSW, BMAS, dan BMRI.

Jenis dan Sumber Data

Upaya memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan observasi dokumen dengan melakukan tinjauan laporan keuangan perusahaan. Adapun laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari mulai periode 2017 hingga 2019 sehingga peneliti dapat menambatkan sampel yang terbaru dalam laporan keuangan perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari banyak jenis sumber yang tersedia. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui www.idx.co.id berupa annual report perusahaan.

PEMBAHASAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Sebagaimana pada penelitian ini, data yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif. Data pada penelitian ini diolah melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang memiliki beberapa tahap yaitu (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis yang juga memiliki beberapa tahapan yaitu (regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji statistik t).

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan informasi seperti rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dengan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen yaitu profitabilitas dan *good corporate governance*.

Tabel 1
Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif Sebelum *Outlier*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	69	-92.00	31.00	4.6522	21.75791
KOI	69	333.00	1000.00	587.9420	106.67155
MP	69	2.00	5036.00	361.2319	726.32352
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021

Return On Asset (ROA)

Nilai *Return On Asset* yang didapat pada tabel 1 yaitu tabel analisis deskriptif sebelum *outlier*. Diketahui ROA pada 69 data perusahaan yang menjadi sampel memiliki nilai minimum -92,00 dan nilai maksimum 31,00 dengan rata-rata 4,6522 pada standar deviasi sebesar 21,75791. Maka nilai mean lebih kecil dari pada standar deviasi dimana mean pada ROA memiliki nilai 4,6522 dan standar deviasi pada ROA memiliki nilai 21,75791 ($4,6522 < 21,75791$). Itu artinya bahwa tidak ada penyebaran yang merata pada sebaran nilai perusahaan.

Komisaris Independen (KOI)

Nilai komisaris independen yang didapat pada tabel 1 analisis deskriptif sebelum *outlier*, diketahui KOI pada 69 data perusahaan yang menjadi sampel memiliki nilai minimum 333,00 dan nilai maksimum 1000,00 dengan rata-rata 587,9420 pada standar deviasi sebesar 106,67155. Maka nilai mean lebih kecil dari pada standar deviasi. Dimana mean pada KOI memiliki nilai 587,9420 dan standar deviasi pada KOI memiliki nilai 106,67155 ($587,9420 > 106,67155$). Berbeda dengan ROA, itu artinya bahwa terdapat penyebaran yang merata pada sebaran perusahaan.

Manajemen Pajak (MP)

Nilai Manajemen Pajak yang didapat pada tabel 1 yaitu tabel analisis deskriptif sebelum *outlier*, diketahui MP pada 69 data perusahaan yang memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 5036,00 dengan rata-rata 361,2319 pada standar deviasi sebesar 726,32352. Maka nilai mean lebih kecil dari pada standar deviasi. Dimana mean pada MP memiliki nilai 361,2319 dan standar deviasi pada MP 726,32352 ($361,2319 < 726,32352$). Itu artinya bahwa tidak ada penyebaran yang merata pada sebaran nilai perusahaan.

Tabel 2
Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif Setelah Outlier

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
ROA	54	-14.00	31.00	11.7407	10.33438
KOI	54	333.00	800.00	585.1852	93.56505
MP	54	116.00	337.00	246.7407	47.87885
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021

Return On Asset (ROA)

Nilai *Return On Asset* yang didapat pada tabel 2 yaitu tabel analisis deskriptif sesudah *outlier*, diketahui ROA pada 54 data perusahaan yang menjadi sampel memiliki nilai minimum -14,00 dan maksimum 31,00 dengan rata-rata 11,7404 pada standar deviasi sebesar 10,33438. Maka nilai mean masih lebih kecil dari pada standar deviasi sebelum *outlier*. Dimana mean pada ROA memiliki nilai 11,7407 dan standar deviasi pada ROA memiliki nilai 10,33438 ($11,7404 > 10,33438$), itu artinya bahwa terdapat penyebaran yang merata pada sebaran perusahaan setelah dilakukan *outlier*.

Komisaris Independen (KOI)

Nilai Komisaris Independen yang didapat pada tabel 2 yaitu tabel analisis deskriptif sesudah *outlier*, diketahui KOI pada 54 data perusahaan yang menjadi sampel ini memiliki nilai minimum 333,00 dan maksimum 800,00 dengan rata-rata 585,1852 pada standar deviasi 93,56505. Maka nilai mean lebih kecil dari pada standar deviasi. Dimana mean pada KOI memiliki nilai 585,1852 dan standar deviasi pada KOI memiliki nilai 93,56505 ($585,1852 > 93,56505$). Itu artinya bahwa terdapat penyebaran yang merata pada sebaran perusahaan.

Manajemen Pajak (MP)

Nilai Manajemen Pajak yang terdapat pada tabel 2 yaitu tabel analisis deskriptif sesudah *outlier*, diketahui MP pada 54 data perusahaan yang memiliki nilai minimum 116,00 dan nilai maksimum 337,00 dengan rata-rata 246,7407 pada standar deviasi sebesar 47,87885. Maka nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi. Dimana mean pada MP memiliki nilai 246,7407 dan standar deviasi pada MP 47,87885 ($246,7407 > 47,87885$). Itu artinya bahwa terdapat penyebaran yang merata pada sebaran perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.592

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021

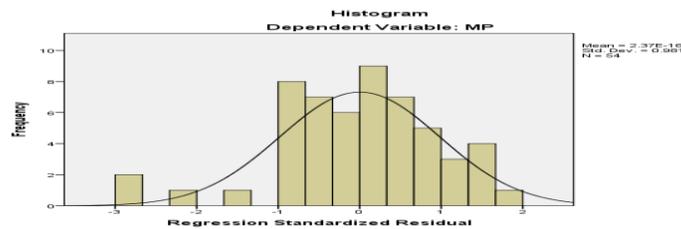
Predictors: (Constant), KOI, ROA

Dependent Variable: MP

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menyimpulkan bahwa nilai yang di peroleh dari uji *Durbin Watson* adalah berada diantara -2 dan 2 yaitu 1,592 maka uji dapat diterima karena tidak terjadi autokorelasi.

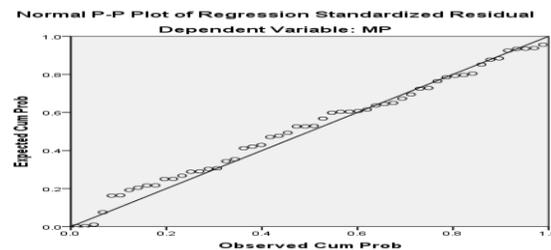
Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan analisis grafik dengan melihat hasil *output* SPSS Grafik Histogram dan *Normal P Plot of Regression Standardiez Residual* dan *Scatterplot*.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

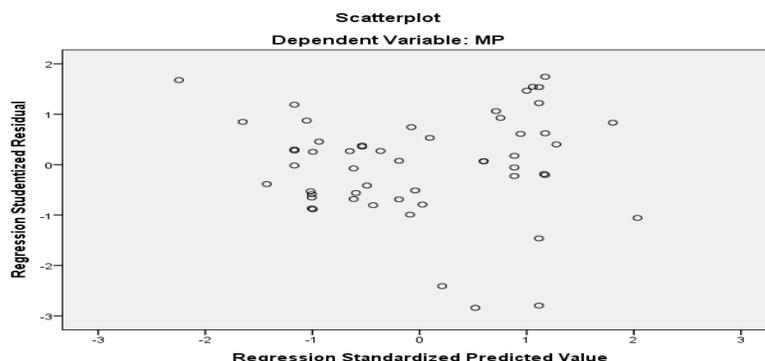
Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021



Gambar 2. Hasil Uji Normal P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan tampilan *Output Chart* yang menyajikan grafik histogram dan grafik plot diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan. Artinya adalah data berdistribusi normal. Begitupun dengan grafik P-Plot terlihat bahwa titik-titik yang ada mendekati garis diagonalnya sehingga dapat diasumsikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Scatterplot
 Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021

Gambar diatas terlihat bahwa titik plot tidak membentuk pola dan titik plot menyebar. Maka penelitian ini menyimpulkan uji dapat diterima karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model Regresi Berganda

Analisis statistik yang bisa digunakan untuk menjelaskan gambaran suatu hubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen atau lebih. Analisis regresi yang digunakan oleh peneliti dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas (ROA), *good corporate governance* (GCG) terhadap manajemen pajak (ETR) yang terdapat dalam perusahaan sektor perbankan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Berikut ini hasil dari uji regresi berganda:

Tabel 4
 Persamaan Regresi Linear Berganda
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	21.885	1.407		15.557
	ROA	.042	.057	.101	.737
	KOI	.046	.025	.250	1.824

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021

Dari hasil regresi linear berganda pada tabel 4 diatas, terdapat hasil dari perhitungan dengan menggunakan SPSS, nilai dari ROA (X1) terhadap Manajemen Pajak (Y) sebesar 0,042 dengan hasil t sebesar 0,737 dan nilai dari KOI (X2) terhadap Manajemen Pajak (Y) sebesar 0,46 dengan hasil t sebesar 1,824 sehingga dapat dijelaskan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel profitabilitas dan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

$$ETR = 21,885 + 0,042 ROA + 0,046 KOI.$$

Uji Hopotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari profitabilitas (ROA), dan *good corporate governance* (KOI) dapat dikatakan layak apabila dengan tingkat signifikan 0,05. Berikut ini hasil dari pengolahan data:

Tabel 5
Hasil Perhitungan Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2426.196	2	1213.098	.520	.598 ^b
	Residual	119070.174	51	2334.709		
	Total	121496.370	53			

Dependent Variabel: MP

Predictors: (Constant), KOI, ROA

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat uji model dengan uji signifikan F menunjukkan bahwa hasil yang didapat dari penelitian ini secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap manajemen pajak. Seperti yang diketahui nilai uji F adalah 0,520 dengan uji sig. 0,60 > 0,05.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa R-square memperoleh angka yaitu 0.02 atau (2%). Hal ini menunjukkan bahwasanya presentase pengaruh variabel independen (profitabilitas dan *good corporate governance*) terhadap variabel dependen (manajemen pajak) sebesar 2%. Sehingga variabel X berkontribusi kecil

pada pergerakan baik peningkatan maupun penurunan pada variabel Y. Sedangkan pada koefisien korelasi terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen (profitabilitas dan good corporate governance) terhadap variabel dependen (manajemen pajak) dapat dilihat dari nilai r yaitu 0.141.

H₁: Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Tabel 6
Coefficient Determination
Model Summary^b

Model	R	R Square
1	.141 ^a	.020

Predictors: (Constant), KOI, ROA

Sumber: Data yang Diolah oleh SPSS, 2021

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada manajemen pajak. Sehingga hal ini dapat dianggap bahwasanya perusahaan yang melakukan manajemen pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat besar atau kecilnya ROA yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, karena manajemen pajak merupakan tindakan yang dapat dianggap tidak menyalahi aturan, jadi perusahaan dapat tetap melakukan manajemen pajak walaupun laba yang di peroleh besar atau kecil. Maka dengan demikian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aprilia dan Visa, 2020) sebagai H₁ pada penelitian ini ditolak.

H₂: *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak

Dari hasil data penelitian yang dilakukan, maka variabel *Good Corporate Governance* (GCG) dapat disimpulkan tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap variabel Manajemen Pajak. Proporsi Dewan Komisaris dalam perusahaan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan efisiensi pajak perusahaan di Indonesia. Maka dengan demikian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fariski dan Hesti, 2019) sebagai H₁ pada penelitian ini dapat diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

Secara simultan atau bersama-sama tidak terjadi pengaruh terhadap Manajemen Pajak. Profitabilitas (X1) secara parsial atau secara individu tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. *Good corporate governance* (X2) secara parsial atau secara individu tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Saran

Disarankan agar peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel-variabel independen yang kemungkinannya dapat mempengaruhi manajemen pajak, baik itu dari faktor internal dan juga eksternal perusahaan. Yaitu seperti: Fasilitas Perpajakan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Q., & Subardjo, A. (2015). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.
- Aprilia, & Visca, F. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Profitabilitas, Dewan Komisaris, Dan Ukuran Entitas terhadap Manajemen Pajak. *STIESIA*.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN CAPITAL INTENSITY. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2013). MANAJEMEN PERPAJAKAN (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis). Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama .
- Chairil Anwar Pohan, M. M. (2019). MANAJEMEN PAJAK KORPORAT KEMARITIMAN (Berdasarkan Konsep dan Strategi Tax Planning). Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, R. (2011, November 2). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6.
- Evan, & Wijaya, R. (2020). Pengaruh Provitabilitas dan Lverage Terhadap Manajemen Pajak. *Universitas Andalas*.
- Fariski, & Hesti. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Akuntansi UMBY*.

- Fatimah. (2019, Agustus). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *e-Jurnal Manajemen Prodi Manajemen*, 8.
- Krisardiyansah, & Amanah, L. (2020, November 19). Pengaruh Cash Flow, Profitabilitas, Likuiditas dan Lverage Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9.
- Kurniawan, I. S. (2019, November 2). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel*, 16.
- Lumbantoruan, S. (2008). Manajemen Pajak. In E. Suandy, *Perencanaan Pajak* (p. 6). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- M. Farouq S., A. S. (2018). *HUKUM PAJAK DI INDONESIA : SUATU PENGANTAR ILMU HUKUM TERAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN*. Jakarta: K E N C A N A (Divisi dari PRENADAMEDIA Group).
- Nurjanah, M., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Lverage Perusahaan Pada Manajemen Pajak. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8.
- Rahmawati, S. (2016). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Press.
- Santoso, A. M. (2014, September 30). Pengaruh Good Corporate Governance(GCG), Capital Adequcy Ratio (CAR), dan Nt Interest Margin (NIM) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013.
- Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Rencana Dewi, G. A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 11.
- Suandy, E. (2008, 2007, 2006, 2004). *PERENCANAAN PAJAK* (4 ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F., Purba, S., Astuti , . . . Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Yuniati, Z., Nuraina, E., & Astuti, E. (2017). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)*, 5.

STUDI TENTANG FUNGSI PENGAWASAN ATAS PENGUNGKAPAN CSR

Priscilla Ruth Putri¹ and Hisar Pangaribuan²
Adventist University of Indonesia

ABSTRACT. *This study aims to determine whether the supervisory function seen from the proportion of independent commissioners and independent audit committees has a significant influence on Corporate Social Responsibility (CSR). The samples used in this study were 53 samples of banks in Indonesia, Malaysia, and Singapore. The method used in this research is descriptive coefficient, coefficient of determination, correlation coefficient, F test, and T test. The results of this study indicate that the independent board of commissioners has no effect on CSR disclosure with t count $-0.038 < t$ table 1.65978 with is 0.05 or sig level. 0.704 is greater than 0.05 and the independent audit committee has no effect on CSR disclosure with t count $0.229 < t$ table 1.65978 with, 0.05 or sig level. 0.819 greater than 0.05*

Keywords: *Oversight Function; Proportion Audit Committee Independence; Audit Committee Independence; Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Semua perusahaan pada dasarnya berkeinginan untuk menghasilkan keuntungan dan laba setinggi-tingginya. Namun, kadang mereka tidak sadar bahwa kegiatan operasional yang mereka lakukan dapat mempengaruhi lingkungan yang bisa menyebabkan kerusakan dan kerugian. Tingginya kesadaran masyarakat akan lingkungan membuat perusahaan sadar dan berlomba untuk memberikan citra baik kepada masyarakat. Nilai perusahaan yang tinggi digunakan sebagai strategi kompetitif bagi yang memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan (Widyasari, dkk, 2015). Kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial harus dilandaskan dengan pemikiran bahwa selain memiliki kewajiban ekonomi dan *valid* terhadap pemegang saham (Wijaya, 2012). Oleh karena itu, perusahaan mulai sadar pentingnya memperhatikan lingkungan sekitar dan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) semakin dibutuhkan untuk memiliki gelar asosiasi yang mengarah pada peningkatan minat di masyarakat. Minat ini tercermin dalam berbagai bidang, termasuk media, analisis pendidikan, politik, dan lingkungan bisnis. CSR mungkin merupakan definisi luas dari tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, penciptaan pengembangan properti, dan stabilisasi ekonomi, suasana, dan lingkungan sosial. CSR tidak lagi dinilai untuk mencapai tujuan

kesejahteraan dan tidak lagi dipromosikan oleh pemerintah. Namun, undang-undang tersebut didorong secara endogen oleh perusahaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan tujuan kelompok sosial saat ini, banyak pelanggan yang mendesak mereka untuk melakukan perubahan, mengklarifikasi banyak hal, dan berpartisipasi dalam masalah sosial, budaya dan lingkungan, bahkan ketika perusahaan sedang menjalankan bisnis. Pengungkapan CSR adalah bentuk dari komunikasi perusahaan dengan kelompok atau tokoh berkepentingan dan masyarakat umum secara keseluruhan (Mukti dan Kurni, 2015).

Program CSR adalah salah satu investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan untuk dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih untuk keuntungan (Rindawati, 2015). Menurut Gray ey al. (Sembiring, 2005) bahwa tumbuhnya peran sebuah perusahaan di masyarakat telah melahirkan kritik dan kekhawatiran karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat keamanan produk, serta hak dan status tenaga kerja, sehingga sebagian besar perusahaan yang terdaftar di BEI banyak yang sudah menerapkan CSR, karena mereka dituntut untuk bertanggung jawab dengan tidak hanya memaksimalkan laba perusahaan tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial tempat mereka berdiri.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat menjadi topik perdebatan ekonomi dan bisnis. Perkembangan tersebut merupakan salah satu hal yang perlu diungkapkan dalam anggaran sebagai bukti bahwa usaha tersebut sebenarnya memiliki kegiatan CSR. Fitria dan Hartanti (2010) menegaskan bahwa deteksi CSR diterapkan di pasar modal dengan menggunakan indikator yang digunakan dalam praktik CSR. Contoh: Setiap bursa memiliki *Stock Market Ownership Index (DJSI)*, *London Stock Exchange* memiliki *Socially Responsible Investment Index (SRI)*, dan *Times Currency Exchange (FTSE)* memiliki *FTSE4Good*, *Hansen Exchange*, Singapura (Effendi, 2009).

Rencana utama CSR adalah membentuk perusahaan menjadi pola pikir *triple bottomline* yang mencakup keuangan, masyarakat dan lingkungan. Ide akhir tunggal harga perusahaan melalui rencana keuangan tidak relevan di era ini, karena hanya membatasi keuntungan tanpa mengkhawatirkan sisi lain (Putri, 2014). CSR ini diadopsi secara luas oleh beberapa perusahaan publik di Asia. Tren CSR global ini juga sedang diterapkan di industri bank.

Pengungkapan CSR sangat erat kaitannya dengan *good corporate governance (GCG)* yang diperhatikan oleh dunia usaha. Ide ini memiliki tujuan utama keseimbangan internal dan eksternal. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif. Fungsi pengawasan yang

terdiri dari proporsi dewan komisaris independen (PDKI) dan proporsi komite audit independen (PKAI).

Informasi tentang tanggung jawab perusahaan saat ini meskipun menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan, pada kenyataannya hal tersebut menjadi dasar bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan perusahaan, sehingga adopsi data ini akan berdampak besar bagi properti perusahaan. Pengungkapan CSR di Indonesia termasuk pengungkapan wajib karena telah ada regulasi yang mewajibkannya, salah satunya adalah peraturan Bapepam nomor X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang berlaku sesuai dengan Kep. Ketua Bapepam dan LK no. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Secara tidak langsung, khususnya investor dan calon investor untuk bahan dasar keputusan investasi dan bagi karyawan untuk memperkirakan karakteristik nasib pekerjaan mereka dan pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menggunakan Laporan Tanggung Jawab Sosial perusahaan sebagai referensi dasar untuk kepatuhan dan mengontrol jalannya aktivitas perusahaan untuk menciptakan skenario yang harmonis antara lingkungan perusahaan dan lingkungan sosial (Khadifa dan Chariri, 2014).

Penelitian ini dilakukan oleh beberapa studi sebelumnya. Penelitian Rivandi dan Putra (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sedangkan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Restu, Yuliandari, dan Nurbaiti (2017) menyatakan proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* sedangkan ukuran komite audit secara parsial berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Studi Tentang Fungsi Pengawasan atas Pengungkapan CSR”

LANDASAN TEORI

Dewan Komisaris Independen

Semakin banyak pemonitor akan semakin baik karena terjadinya konflik semakin rendah dan akhirnya menurunkan *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi (Ratnasari dan Prastiwi, 2010; Pangaribuan, 2016).

Komite Audit

Komite audit adalah bagian integral dari peningkatan struktur dan praktik *Good Corporate Governance* (Arens, et al., 2012). Tanggung jawab komite audit untuk mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal dan auditor independen (Rivandi & Gea, 2010). Sedangkan menurut Widyati (2013), komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut jasa keuangan no. 55, 2015, setiap tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh komisaris kepada komite audit, maka komite audit harus menjalankannya baik dari segi kinerja keuangan maupun kinerja sosial. Menurut Ratnasari (2011), semakin banyak anggota komite audit akan semakin baik untuk dapat meningkatkan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan terhadap inovasi dan berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* CSR merupakan fungsi dari etika bisnis global yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat secara keseluruhan, serta peningkatan taraf hidup karyawan dan keluarganya secara keseluruhan. Menurut ISO 26000 tentang pedoman tanggung jawab sosial, CSR adalah tanggung jawab sosial atas dampak keputusan dan tindakan sosial dan lingkungan, sebagaimana ditetapkan dengan jelas dalam kerangka etika yang transparan dan konsisten dengan pengembangan kesejahteraan yang berkelanjutan, memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang ditetapkan dan integrasi dengan seluruh organisasi. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, karena rencana tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya nyata perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan berdampak pada masyarakat dengan meningkatkan kualitas kesejahteraannya di bidang sosial, ekonomi, dan sosial pendidikan dan lingkungan, seperti akses transportasi dan kesempatan kerja.

CSR adalah sebuah kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab untuk mencermati lingkungan sosial demi kemakmuran dan kepentingan bersama (Rivandi et al. 2017; Pangaribuan et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh *Global Reporting Initiative* (2008) menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan jumlah

entitas bisnis yang membuat laporan CSR, 300 entitas bisnis di tahun 1996 menjadi 3.100 entitas bisnis di tahun 2008. Menurut Elkington merumuskan 3 prinsip dasar yang melandasi CSR yaitu:

- a. Profit (laba), perusahaan berusaha untuk mendapatkan laba yang besar untuk dapat menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan bisnisnya.
- b. People (orang), perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar memperoleh legitimasi atas segala kegiatan bisnis yang dilakukan. Legitimasi diperlukan agar terwujud suatu perusahaan yang *sustainable and acceptable*.
- c. Planet, perusahaan merupakan bagian dari lingkungan dimana perusahaan itu berada. Bentuk tanggung jawab perusahaan atas kepeduliannya dengan lingkungan adalah dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan hayati (Hadi, 2011).

Teori Legitimasi

Teori ini berkaitan dengan terciptanya kesesuaian sistem nilai suatu perusahaan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat. Menurut Hadi (2011), Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitar baik fisik maupun nonfisik. Legitimasi dapat diperoleh jika terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan dan Tobin, 2002). Konsep “kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas.

Teori Stakeholder

Ghozali dan Chariri (2007), bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Tugas perusahaan yaitu memaksimalkan *profit* demi untuk para pemegang saham dan apabila perusahaan melakukan aktivitas CSR diluar kepentingan *stakeholder*, maka hal itu akan menyalahi tujuan utama perusahaan (Friedman, 1967). Kepentingan-kepentingan *stakeholder* ini harus dipenuhi karena apabila diabaikan maka perusahaan akan kehilangan legitimasi dari *stakeholder*. Menurut Hadi (2011), perusahaan hendaknya menjaga reputasi dengan cara menggeser pola orientasi yang semula semata-mata diukur dengan *measurement* yang cenderung *shareholder orientation* kearah memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial masyarakat.

Teori Keagenan

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa dan kepentingan mereka yaitu dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori keagenan, menggambarkan bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah dimana hubungan tersebut timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh masyarakat untuk pemerintah yang menyediakan jasa untuk kepentingan masyarakat.

Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR

Hasil dari penelitian Ratnasari dan Prastiwi (2010) mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap CSR. Menurut hasil dari Santioso dan Chandra (2012), bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan menurut Rivandi dan Putra (2019), proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Komisaris independen dapat menjadi komisaris yang bukan merupakan anggota pihak terkait atau tidak mempunyai hubungan keluarga atau bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan oleh karenanya dewan komisaris dan orang lain selain perusahaan itu sendiri (Putri, 2013). Keberadaan komisaris independen diasumsikan netral terkait dengan semua kebijakan yang dikembangkan oleh direksi. Karena komisaris independen tidak dipengaruhi oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan data secara lebih luas kepada pihak yang berkepentingan (Ratnasari, 2011).

Muntoro (2006) mengatakan bahwa komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris dari kepentingan investor dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Jika jumlah komisaris independen meningkat, maka fleksibilitas dewan komisaris dalam membuat proposal agar tidak kehilangan netralitas dan mengutamakan perusahaan akan menjadi tantangan besar (Untoro, 2013). Beberapa analisis sebelumnya oleh Haniffa dan Cook (2002) telah menyebutkan bahwa proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan. Pada teori dan temuan yang disajikan, asumsi yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh pada Pengungkapan CSR

Proporsi Komite Audit Independen terhadap Pengungkapan CSR

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Suhardianto (2016), mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Menurut Abidin dan Lestara (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan menurut Darmayanti (2014), komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Selain memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan, komite audit juga dituntut untuk menjaga independensinya. Dimana komite audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang berbeda, sehingga hasil pengawasan yang dilakukan mendapatkan hasil yang obyektif dan oleh karena itu manajer menyadari hal-hal yang perlu diperbaiki (Chrisdianto, 2013). Selain itu, komite audit independen juga diartikan sebagai individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, sehingga hasilnya akan kredibel (Cahyono, Andini, Raharjo, 2016). Raharjo dan Daljono (2014) menambahkan bahwa semakin besar proporsi komite audit independen dapat menawarkan pengawasan yang lebih tinggi sehingga akan menawarkan kepercayaan dan kualitas laporan.

Ditambahkan oleh (Marpaung & Latrini, 2014) semakin kecil proporsi komite audit yang independen, maka kewenangan yang dimiliki oleh unit area tersebut dibatasi dan mengurangi operasinya daripada pengawasan yang diadministrasikan. Komite audit sebaiknya berasal dari pihak luar, sehingga dapat dipercaya sebagai independen, karena anggota yang berasal dari pihak luar tidak akan memperlakukan kegiatan atau pengelolaan perusahaan. Selain itu, anggota komite audit independen harus memiliki keahlian sehingga dapat memperluas fungsi pengawasan secara efektif.

Sehingga diharapkan melalui pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, dapat membuat internal perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan kepercayaan antar pihak internal dan eksternal. Pada teori dan temuan yang disajikan, asumsi yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

H2: Proporsi Komite Audit Independen berpengaruh pada Pengungkapan CSR

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan melakukan pengumpulan data yang terdapat dalam laporan tahunan sebuah perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ada dalam laporan tahunan perusahaan perbankan Indonesia, Singapura dan Malaysia periode 2018-2019. Subjek penelitian ini berasal dari total 53 perusahaan perbankan di Indonesia, Singapura dan Malaysia yang didapat dari bursa efek masing-masing negara periode 2018-2019. Untuk mendapatkan laporan tahunan perusahaan maka penulis mengunduh laporan keuangan dari bursa efek bank masing-masing negara.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Negara	Jumlah Tahun Penelitian	Jumlah Sampel Penelitian
1	Indonesia	40	80
2	Singapura	3	6
3	Malaysia	10	20
Total		53	106

Metode untuk melakukan pengumpulan sampel adalah dengan menggunakan cara *purposive sampling*, dengan ciri-ciri bahwa perusahaan yang diobservasi adalah perusahaan perbankan yang terdapat di negara Indonesia, Singapura dan Malaysia yang terdaftar di bursa efek masing-masing negara pada periode tahun 2018-2019 yang menyediakan laporan tahunan tiap periode secara lengkap tentang proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen dan juga tanggung jawab sosial perusahaan secara lengkap. Berdasarkan kriteria dan ciri yang tertera di atas, total sampel yang ada dalam penelitian ini berjumlah 106 (terdiri dari 53 perusahaan perbankan di Indonesia, Singapura dan Malaysia selama periode 2018-2019). Secara lengkap sampel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Terdapat tiga variabel yang diamati yaitu pengungkapan CSR, proporsi dewan komisaris independen, dan proporsi komite audit independen. Penelitian ini menggunakan 79 item CSR yang didapatkan dari laporan tahunan perbankan yang ada. Proporsi dewan komisaris dan proporsi komite audit independen di dapat dari laporan tahunan perbankan masing-masing. Proporsi dewan komisaris independen didapat dari anggota dewan komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris dan proporsi komite audit independen didapat dari anggota audit independen dibagi jumlah anggota audit seperti yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Pengungkapan Corporate Social Responsibility	$CSR D = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{79 \text{ item}}$	Rasio
Proporsi Dewan Komisaris Independen	$PDK I = \frac{\text{anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$	Rasio
Proporsi Komite Audit Independen	$PKAI = \frac{\text{anggota audit independen}}{\text{jumlah anggota audit}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan uji deskriptif, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji F dan uji T untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR dan proporsi komite audit independen terhadap pengungkapan CSR.

Uji Deskriptif

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa nilai min. dewan komisaris independen adalah 0.43 dengan nilai maksimum 1.00 yang berarti bank-bank tersebut hanya memiliki 43% dewan komisaris yang independen dengan beranggotakan 100% anggota dewan komisaris yang independen. Nilai *mean* 0.6095 yang berarti rata-rata 60.95% anggota dewan adalah anggota dewan komisaris yang independen. Dengan dilihat dari hasil rata-rata dapat dikatakan bahwa telah terselenggaranya korporasi yang baik pada perusahaan perbankan di Indonesia, Singapore, dan Malaysia. Sedangkan nilai minimal komite audit independen adalah 0.50 dengan nilai maksimum 1.00 yang berarti bank-bank tersebut memiliki 50% komite audit yang independen dengan beranggotakan 100% komite audit independen. Dengan nilai *mean* 0.9660 yang artinya 96.60% anggota komite adalah komite audit independen. Diharapkan dengan semakin besarnya proporsi komite audit independen maka dalam pelaporannya akan dapat dipercaya (Antonia, 2008).

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	106	.43	1.00	.6095	.11892
X2	106	.50	1.00	.9660	.09742
Y	106	.08	.71	.3680	.11133
Valid N	106				

Sumber: olah data 2021

Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Diketahui nilai *r* dalam penelitian ini adalah sebesar -0.036 yang berarti hubungan antara dewan komisaris dan komite audit terhadap CSR perusahaan sangat lemah dan negatif. Tanda

negatif pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen tidak sejalan dengan CSR perusahaan perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Singapore tahun 2018-2019.

Tabel 4. Correlations

		X	Y	Z
X	Pearson	1	.063	-
	Correlations			.036
	Sig. (2-tailed)		.521	.714
	N	106	106	106
Y	Pearson	.063	1	.020
	Correlation			
	Sig (2-tailed)	.521		.837
	N	106	106	106
Z	Pearson	-	.020	1
	Correlation	.036		
	Sig (2-tailed)	.714	.837	
	N	106	106	106

Sumber: olah data 2021

Koefisien Determinasi

Pada tabel 5 menunjukkan nilai *R Square* yang dihasilkan adalah sebesar 0.002 yang berarti bahwa pengaruh proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen terhadap CSR adalah sebesar 0.2% dan 99.8% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.043 ^a	.002	-.018	.11231

Sumber: olah data 2021

Uji F

Hasil analisis regresi didapatkan signifikansi p-value = 0.911 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR perusahaan perbankan.

Tabel 6. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum Squares	Of df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	2	.001	0.94	.91 ^a
	Residual	1.299	103	.013		
	Total	1.301	105			

a. Predictors: (Constant), X2,X1

b. Dependent Variable : Y

Sumber : Olah data 2021

Uji T

Dari uji T dapat dilihat bahwa proporsi dewan komisaris independen (X1) signifikan p-value = 0.704 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H₀ diterima atau proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR perusahaan perbankan. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa proporsi komite audit independen (X2) signifikan p-value 0.819 > 0.05, yang dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H₀ diterima atau proporsi komite audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR perusahaan perbankan.

Tabel 7. Uji t
Coefficients^a

Model		Unst Coefficients		Std Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.364	.120		3.040	.003
	X1	-.035	.092	-.038	-.381	.704
	X2	.026	.113	.023	.229	.819

Dependent Variable : Y

Sumber : olah data 2021

Uji ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2009). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hipotesis tidak diterima karena t hitung -0.038 < t tabel 1.65978 dengan α adalah 0.05 atau level sig. 0.704 lebih besar dari 0.05. Berarti

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perbankan 2018-2019.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hipotesis tidak diterima karena t hitung $0.229 < t$ tabel 1.65978 dengan α , 0.05 atau level sig. 0.819 lebih besar dari 0.05 . Yang berarti tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara proporsi komite audit independen terhadap pengungkapan CSR perbankan 2018-2019.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR tergolong lemah negatif, dan proporsi dewan komisaris independen tidak dapat secara signifikan dalam upaya pengungkapan CSR perusahaan perbankan. Hal tersebut dikarenakan proporsi dewan komisaris independen belum maksimal dalam mengungkapkan CSR perusahaan perbankan di 3 negara tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan proporsi komite audit independen terhadap CSR tidak berpengaruh, dan proporsi komite audit independen tidak dapat secara signifikan dalam upaya pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen belum dapat untuk mengungkapkan CSR perusahaan perbankan di 3 negara tersebut.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada sulitnya untuk perusahaan perbankan memfokuskan terhadap CSR perusahaannya dikarenakan dari laporan tahunan masih tergolong sedikit bank yang fokus terhadap CSR banknya sendiri. Keterbatasan lainnya penelitian ini hanya menggunakan 2 tahun penelitian dari 2018-2019. Sehingga waktu penelitian tergolong sangat sedikit.

Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang baik akan berdampak pada lingkungan disekitarnya, maka disarankan kepada bank yang ada agar dapat meningkatkan pelaksanaan CSRnya masing-masing untuk menjaga lingkungan sekitar juga. Jika peneliti lain juga ingin melakukan penelitian yang serupa disarankan untuk menggunakan perusahaan pertambangan atau manufaktur yang lebih memfokuskan kepada CSRnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiawan, Deni., Rindu Rika Gamayuni., dan Yenni Agustina. 2018. Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol.23 No.2.

- Amalia, Firda Ayu. 2019. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Pengindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* Vol.4 No.2.
- Astuti, Susi. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* Vol.16 No.1.
- Candradewi, Intan., dan Ida Bagus Panji Sedana. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris m Terhadap *Return On Asset*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5 No.5.
- Hapsoro, Dody. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 23 No.3.
- Hidayati, Nurul., dan Fidiana. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 6 No.3.
- Krisna, Aditya Dharmawan., dan Novrys Suhardianto. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 18 No.2.
- Lamia, Fathia Vivie., Zirman., dan Yueita Anisma. 2014. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Porsi Kepemilikan Saham Publik dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Laporan Tahunan Perusahaan *Food & Beverages* Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *JOM Fekon* Vol. 1 No.2.
- Nurkin, Ahmad. 2010. *Corporate Governance* dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol.2 No.1
- Nussy, Trudy Maryona. 2013. *Corporate Governance* dan Entnisitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 17 No.1.
- Pangaribuan, H., Sihombing, J., Popoola, O. M. J., & Sinaga, A. M. N. (2019). An Examination of Voluntary Disclosure, Independent Board, Independent Audit

Committee and Institutional Ownership. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 52–67. <https://doi.org/10.52962/ipjaf.2019.3.2.68>

- Pangaribuan, H. (2016). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Dewan Komisaris dan Struktur Kepemilikan terhadap Kualitas Audit serta Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Disertasi doctoral. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Putra, Andi Harita., dan Muhammad Riyandi. 2019. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Perusahaan *High Profile* di Bursa Efek Indonesia). *Academic Conference of Accounting J Vol. 1*.
- Rahmawati, Inge Andhitya., Brady Rikumahu., dan Vaya Juliana Dillak. 2017. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol.2 no.2*.
- Rindawati, Meita Wahyu. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No.6*.
- Rivandi, Muhammad., dan Andi Harita Putra. 2019. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Perusahaan *High Profile* di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 8*.
- Siregar, Ivana., Lindrianasari., dan Komaruddin. 2013. Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.4 No.1*.
- Widyasari, Nita Ayu., Suhadak., dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 26 No.1*.

PENGARUH PPN DAN PPH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK PUSAT

Rano Karno¹ dan Marthinus Ismail²

Universitas Advent Indonesia

Email : 1832011@unai.edu, ranokarnojr@gmail.com

ABSTRACT. *The Directorate General of Taxes (DGT) or Central Tax is the government's partner in implementing tax reform in Indonesia to increase tax revenues which will be managed by the government and set forth in the APBN. The purpose of this study was to determine the effect of VAT and PPh on central tax revenues based on secondary data from the 2000-2019 DGT annual report. The research method used is a confirmation method that is processed from quantitative data. Analysis of the data used is descriptive analysis, correlation coefficient, coefficient of determination, significance test and simple regression. The results showed that the average increase in VAT receipts from year to year was Rp.258.8 million, while the average increase in income tax revenues was Rp.376.5 million, and the average increase in central tax revenues was Rp. 657.1 million. VAT and PPh have an influence on central tax revenues. The significance test shows that H_0 is accepted ($sig. 0.00 > 0.05$) so that VAT and PPh have a significant effect on central tax revenue.*
Keyword: VAT, PPh, Central Tax.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Maka untuk melakukannya dibutuhkan dana atau anggaran yang berdasar dari dalam negeri. Dengan adanya dana atau anggaran maka pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan akurat. Sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian Indonesia dan mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia, agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, diperlukan perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, baik UU KUP, UU PPh, maupun UU PPN, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Perubahan ketentuan perpajakan tersebut telah diinisiasi melalui pengusulan RUU Omnibus Law Perpajakan dan memiliki tujuan yang mendukung dan selaras dengan tujuan RUU Cipta Kerja dalam menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan tersebut dimasukkan sebagai bagian dalam RUU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui peningkatan iklim berusaha di Indonesia.

Di samping itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, perlu upaya menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha.

Dalam Perkembangannya, terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Pajak tidak langsung adalah contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecendrungan peningkatan penerimaan pajak, pajak pertambahan nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan pajak penghasilan (PPh), hal tersebut karena tidak semua orang dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh).

John F. Due (2001:36) seorang pakar ilmu keuangan negara dan pajak yang dikutip oleh pandiangan, menyatakan bahwa pada umumnya di negara berkembang, pajak tidak langsung mempunyai peran yang besar dalam penerimaan pemerintah yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya selalu melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Sejalan dengan program tersebut dari tahun ke tahun, terus dilakukan peningkatan pada target penerimaan pajak. Penetapan target dan perbaikan sistem yang terus meningkat ini berdampak pada wajib pajak agar semakin baik dalam proses administrasi perpajakannya (Wardoyo dan Subiyakto, 2017). Sepanjang sejarah Indonesia, perpajakan menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan jaman melalui program reformasi perpajakan. Pemerintah telah menjalankan beberapa reformasi perpajakan yang dimulai dari reformasi Undang-Undang.

Perpajakan (1983) yang menitik beratkan pada penyederhanaan jenis pajak. Pemerintah melanjutkan dengan menetapkan visi dan misi serta blueprint (2000) untuk menghadapi Reformasi Perpajakan jilid 1 (2002) dimana pelaksanaan pelayanan satu atap diberlakukan. Dilanjutkan dengan Reformasi Perpajakan jilid II (2009) dalam peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Perpajakan jilid III menjadi reformasi terbesar yang mencakup lima pilar utama yang diusung setelah berakhirnya program tax amnesty yang terus dikembangkan hingga tahun 2024 dibidang IT dan basis data serta proses bisnisnya (www.pajak.go.id). Beban pemerintah semakin besar di APBN, kala anggaran yang ada saat ini banyak dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi (Santoso, 2020).

Tabel 1
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2013 S.D. 2018

(Miliar Rupiah)

No.	Wajib Pajak	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PPh Non Migas	417.695,35	458.735,21	552.636,57	630.111,74	596.477,37	685.320,28
2	PPN dan PPnBM	384.713,52	409.181,63	423.710,82	412.210,91	480.724,61	537.422,98
3	PBB	25.304,58	23.476,23	29.250,34	19.443,71	16.770,35	19.427,12
4	Pajak Lainnya	4.937,08	6.293,36	5.568,30	8.104,89	6.738,48	6.613,44
5	PPh Migas	88.747,45	87.445,66	49.671,56	36.101,09	50.315,75	64.394,39
Total Penerimaan Pajak		834.663,53	899.700,43	1.013.181,02	1.071.887,24	1.102.727,80	1.250.801,83

Sumber: www.pajak.go.id

Secara umum dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak (tabel) pada tahun 2016 saat diberlakukannya tax amnesty, khususnya di PPN dan PPnBM, PBB, PPh Migas dan pajak lainnya. Program tax amnesty ini menjadi pertarungan pemerintah dalam membentuk institusi perpajakan yang lebih kuat, kredibel dan akuntabel. Khususnya untuk penerimaan PPN dan PPh Migas Non Migas terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Berdasarkan keterangan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PPN Dan PPh Terhadap Pendapatan Pajak Pusat”

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Hukum

Penelitian ini mencantumkan beberapa landasan hukum yang didasari dari pembahasan tentang operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Pendapatan operasional perpajakan diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen III, Bab VIII pasal 23 tentang keuangan negara yang terkandung pelaksanaan kewajiban atau tugas pemerintah didalam bentuk APBN yang disusun berdasarkan rencana pembangunan dalam jangka panjang dan menengah. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai Pemerintah pusat dan Pembangunan. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, PPh, PPN, PPnBM, PBB-P3 dan Bea Materai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status perusahaan kena pajak. Menurut UU No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Perkembangan ekonomi terjadi sangat pesat baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional harus terciptanya jenis-jenis pola transaksi yang baru pada saat ini.

Menurut Supramono (2000: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

PPh (Pajak Penghasilan)

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah “Pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa ,dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”

Menurut Resmi (2011:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. Sedangkan menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak Penghasilan adalah “pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi

atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”. Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

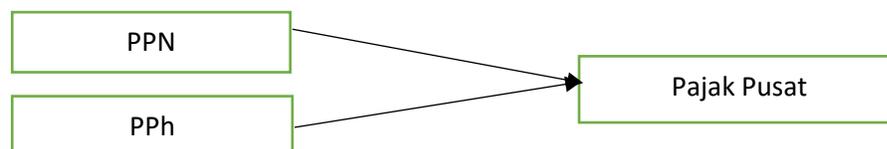
PPH Migas dan Non Migas

Menurut Salim (2010 :282) PPh Migas adalah pajak penghasilan minyak bumi, gas alam, dan batu bara, contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Sedangkan PPh Non Migas adalah di luar dari minyak bumi, gas alam contohnya seperti hasil pertanian, kerajinan, industry, dan lain-lain. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kerangka Pemikiran

Salah satu penerimaan pajak DJP adalah melalui pendapatan PPN dan PPh. PPN dan PPh adalah jenis pajak pusat sehingga dikelola pemerintah pusat. Dengan demikian peningkatan pendapatan PPN dan PPh diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak pusat/DJP dari sektor perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka pemikiran



Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara dari identifikasi penelitian (Sugiyono, 2017). Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pada PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak

METODE PENELITIAN

Metode Konfirmatif

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konfirmatif, karena digunakan untuk pembuktian dari data-data kuantitatif pada data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik. Metode konfirmatif ini menghubungkan gejala bersifat sebab akibat yang dilakukan pada populasi atau sampel yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi (Sugiyono, 2017).

Data Kuantitatif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari situs website DJP melalui www.pajak.go.id sampel penelitian ini terdiri dari 20 sampel penelitian yang berasal dari data keuangan DJP/Pajak pusat yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak pusat yang didapat dari laporan Keuangan DJP 2000–2019.

Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah melalui analisis kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan aslinya. Analisis deskriptif disajikan secara sederhana dalam bentuk gambar atau table tentang penghitungan ukuran sebaran rata-rata, minimum dan maksimum. Di samping itu, diberlakukan juga analisis statistik inferensial korelasional untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Perhitungan analisis data statistik dibantu dengan aplikasi Statistical Product and Service Solutions versi 24. (SPSS v.24). Hasil olahan SPSS v.24 berupa besaran koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji signifikansi dan regresi sederhana.

HASIL PENELITIAN

Penerimaan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) pada DJP/pajak pusat pada tahun 2000-2019 menunjukkan angka rata-rata untuk PPN sebesar Rp.258.8 juta dan untuk rata-rata untuk PPh sebesar Rp. 376.5 juta, maka dapat ditentukan bahwa pendapatan rata-rata PPh lebih besar diterima oleh pajak pusat itu sendiri, karena Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya.

Dalam upaya pendapatan pajak melalui kegiatan operasional yang diterima DJP/pajak pusat dari tahun 2000-2019 menunjukkan bahwa angka perubahan

pendapatan rata-rata pajak pusat sebesar Rp.657.1 juta, peningkatan Pendapatan PPN dan PPh serta pajak pusat dalam 11 tahun rata-rata setiap tahun nya meningkat.

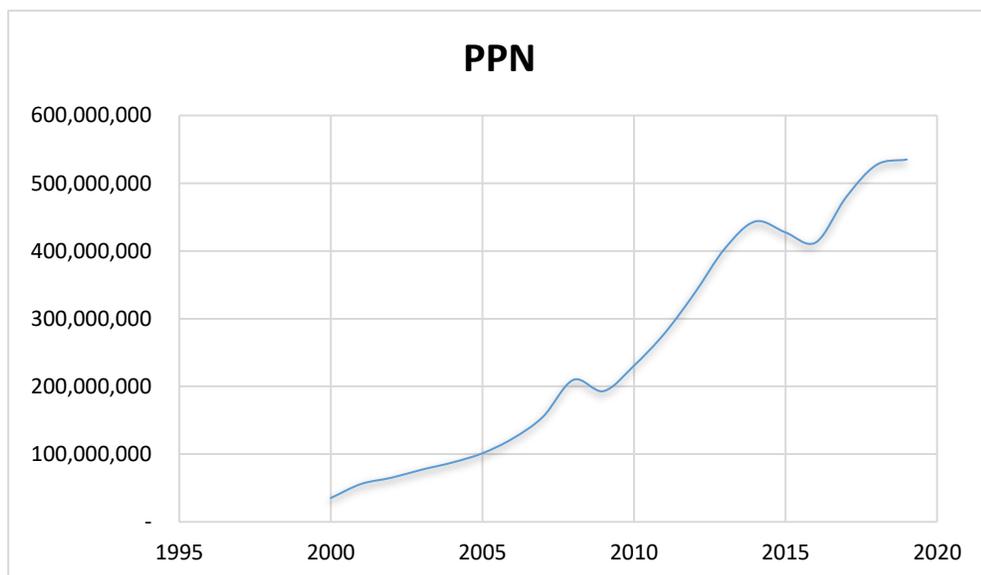
Penelitian ini menetapkan tujuan dan hipotesis penelitian untuk mengetahui pengaruh penerimaan PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak pusat pada DJP. Pengujian dilakukan melalui analisis regresi yang menghasilkan bahwa penerimaan PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak pusat pada tahun 2000-2019 berpengaruh signifikan. Hasil ini dapat diketahui dari nilai ($\text{sig. } 0.00 < 0.05$) sehingga hipotesis alternatif diterima. Hasil pengaruh yang signifikan dapat dilihat melalui tren grafik pendapatan PPN dan PPh yang terus mengalami peningkatan penerimaan pajak pusat pada DJP.

ANALISA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif (PPN)

Penerimaan PPN pada tahun 2000-2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Penerimaan PPN setiap tahunnya meningkat terlihat pada grafik fluktuatif yang diawali dengan tren peningkatan pada tahun 2000 hingga 2019. Hasil olahan data menunjukkan bahwa mean sebesar 258.880.469 dan standar deviasi 172.145.355.

Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan PPN



Sumber: Data olahan Penulis

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Rp.258.8 juta terjadi penurunan standar deviasi sekitar Rp.172.1 juta. Nilai pertumbuhan pendapatan PPN tertinggi yaitu Rp.534.9 juta pada tahun 2019, sedangkan nilai penurunan pendapatan terendah yaitu sebesar Rp.35.2 juta

Analisis Koefisien Kolerasi

Koefisien kolerasi merupakan angka yang digunakan untuk mengukur hubungan kolerasi antar variabel yang memiliki -1 sampai 1. Pada tabel dibawah ini menunjukkan hasil Analisis koefisien kolerasi antara penerimaan PPN dengan pendapatan pajak pusat

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,9944
R Square	0,9887
Adjusted R Square	0,9881
Standard Error	44.559.743,95
Observations	20

Analisis Koefisien kolerasi menunjukkan angka positif 0,9944 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dari penerimaan PPN dengan pendapatan pajak pusat. Nilai positif berguna apabila terjadi peningkatan pada penerimaan PPN maka akan menambahkan pendapatan pajak pusat dan berlaku juga sebaliknya.

Analisis Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel diatas melalui angka yang ditunjukkan pada R Square. Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,9887 atau 98,87%. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PPN pada pendapatan pajak pusat sebesar 98,87% sedangkan sisanya sebesar 0,13% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikansi t

Uji signifikansi yaitu berguna untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari nilai signifikansi F sebesar $0.0 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_0 . Uji signifikansi t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pada PPN terhadap pendapatan pajak pusat.

ANOVA					
	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	3.141.167.062.031.	3.141.167.062.031.	1.581,9970	0,0000
Residual	18	35.740.274.055.	1.985.570.780.		
Total	19	3.176.907.336.086.			

Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan tabel dibawah ini, maka dapat ditentukan sebuah persamaan regresi PPN terhadap pendapatan pajak pusat.

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	45.693.696,85	18.319.931,7358	2,4942	0,0226
PPN	2,3620	0,0594	39,7743	0,0000

Persamaan regresi linear sederhana yang membentuk hubungan antara penerimaan PPN dengan pendapatan pajak pusat adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan pajak pusat} = 45.693.696,85 + 2,3620 \text{ PPN}$$

Makna dari persamaan tersebut adalah bila tidak terdapat penerimaan PPN maka pertumbuhan pendapatan pajak pusat adalah sebesar 45.693.696,85 satuan hitung. Namun terdapat peningkatan 1 satuan hitung pada PPN maka perubahan peningkatan pendapatan pajak pusat akan bertambah 2,3620 satuan hitung.

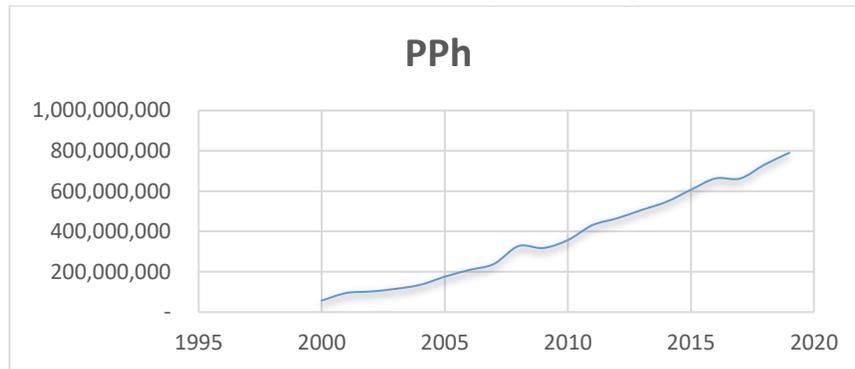
Analisis Deskriptif (PPh)

Penerimaan PPh pada tahun 2000-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Penerimaan PPh setiap tahunnya meningkat terlihat pada grafik fluktuatif yang diawali dengan tren peningkatan pada tahun 2000 hingga 2019. Hasil olahan data menunjukkan mean sebesar 376.573.323 dan standar deviasi sebesar 234.876.461.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Rp.376.5 juta serta terjadi penurunan Standar deviasi sekitar Rp.234.8 juta. Nilai pertumbuhan

Pendapatan PPh tertinggi yaitu Rp.790.3 juta pada tahun 2019, Sedangkan nilai penurunan Pendapatan terendah yaitu sebesar Rp.57.07 juta.

Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan PPh



Analisis Koefisien Kolerasi

Koefisien kolerasi merupakan angka yang digunakan untuk mengukur hubungan kolerasi antar variabel, yang memiliki -1 sampai 1. Pada tabel dibawah ini menunjukkan hasil Analisis Koefisien Kolerasi antara penerimaan PPh dengan pendapatan Pajak Pusat.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,9985
R Square	0,9970
Adjusted R Square	0,9969
Standard Error	22942863,89
Observations	20

Analisis Koefisien Kolerasi menunjukkan angka Positif 0,9985 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dari penerimaan PPh dengan pendapatan Pajak Pusat. Nilai positif berguna apabila terjadi peningkatan pada Penerimaan PPh maka akan menambahkan Pendapatan Pajak Pusat dan berlaku juga sebaliknya.

Analisis Koefisien Determinasi.

Nilai Koefisien dapat dilihat dari tabel diatas melalui angka yang ditunjukkan pada R Square. Koefisien Determinasi menunjukkan angka sebesar 0,9970 atau 99.70%. dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PPh pada pendapatan pajak pusat adalah sebesar 99.70% sedangkan sisanya sebesar 0.3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikansi t

Uji signifikansi adalah berguna untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil nilai signifikansi F sebesar $0.0 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_a . Uji signifikansi t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pada PPh terhadap pendapatan pajak pusat.

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Sig. F</i>
Regression	1	3.167.432.586.020.	3.167.432.586.020.	6.017,4449	0,0000
Residual	18	9.474.750.066.	526.375.003.		
Total	19	3.176.907.336.086.			

Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan Tabel dibawah ini, maka dapat ditentukan sebuah persamaan regresi PPh terhadap pendapatan pajak pusat

Tabel. Regresi Linear Sederhana

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	2.543.738,17	9.875.837,0754	0,2576	0,7997
PPh	1,7384	0,0224	77,5722	0,0000

Persamaan regresi linear sederhana yang membentuk hubungan antara Penerimaan PPh dengan pendapatan pajak pusat adalah sebagai berikut:

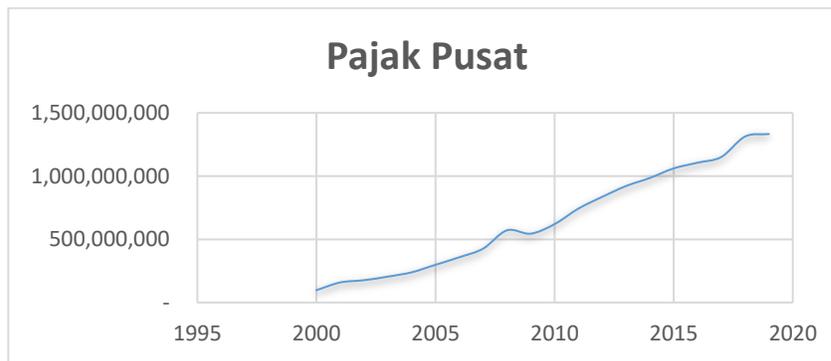
$$\text{Pendapatan Pajak Pusat} = 2.543.738,17 + 1,7384 \text{ PPh}$$

Makna dari persamaan tersebut adalah bila tidak terdapat penerimaan PPh maka pertumbuhan pendapatan pajak pusat adalah sebesar 2.543.738,17 satuan hitung. Namun terdapat peningkatan 1 satuan hitung pada PPh maka perubahan peningkatan pendapatan pajak pusat akan bertambah 1,7384 satuan hitung.

Analisis Deskriptif (Pajak Pusat)

Penerimaan Pajak Pusat pada tahun 2000-2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. penerimaan Pajak Pusat setiap tahunnya meningkat terlihat pada grafik fluktuatif yang diawali dengan tren peningkatan pada tahun 2000 hingga 2019. Hasil olahan data menunjukkan bahwa mean sebesar 657.160.235 dan standar deviasi sebesar 408.907.874.

Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan Pajak Pusat



Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Rp.657.1 juta serta terjadi penurunan Standar deviasi sekitar Rp.408.9 juta. Nilai pertumbuhan Pendapatan Pajak Pusat tertinggi yaitu Rp.1.3 Miliar pada tahun 2019, Sedangkan nilai penurunan Pendapatan terendah yaitu sebesar Rp.97.5 juta.

Analisis Koefisien Kolerasi

Koefisien kolerasi merupakan angka yang digunakan untuk mengukur hubungan kolerasi antar variabel, yang memiliki -1 sampai 1. Pada tabel dibawah ini menunjukkan hasil Analisis Koefisien Kolerasi antara penerimaanpendapatan Pajak Pusat.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,9996
R Square	0,9991
Adjusted R Square	0,9990
Standard Error	12.956.040,4088
Observations	20

Analisis Koefisien Kolerasi menunjukkan angka Positif 0,9996 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dari penerimaan pendapatan Pajak Pusat. Nilai positif berguna apabila terjadi peningkatan pada penerimaan Pendapatan Pajak Pusat dan berlaku juga sebaliknya.

Analisis Koefisien Determinasi.

Nilai Koefisien dapat dilihat dari tabel diatas melalui angka yang ditunjukkan pada R Square. Koefisien Determinasi menunjukkan angka sebesar 0,9996 atau 99.96%. dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PPN pada pendapatan pajak pusat adalah sebesar 99.96% sedangkan sisanya sebesar 0.04% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikansi t

Uji signifikansi adalah berguna untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil nilai signifikansi F sebesar $0.0 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_a . Uji signifikansi t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerimaan pendapatan pajak pusat.

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	3,17405E+18	1,58703E+18	9454,524492	0,0000
Residual	17	2,8536E+15	1,67859E+14		
Total	19	3,17691E+18			

Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan Tabel dibawah ini, maka dapat ditentukan sebuah persamaan regresi penerimaan pendapatan pajak pusat. Persamaan regresi linear sederhana yang membentuk hubungan antara Penerimaan pendapatan pajak pusat adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Pajak Pusat} = 12.947.138,18 + 0,7371 \text{ PPN}(X1) + 1,2040 \text{ PPh}(X2)$$

Dengan demikian dari persamaan tersebut adalah bila tidak terdapat penerimaan PPN dan PPh maka pertumbuhan pendapatan pajak pusat adalah sebesar 12.947.138,18 satuan hitung. Namun terdapat peningkatan 1 satuan hitung pada PPN dan PPh maka perubahan peningkatan pendapatan pajak pusat akan bertambah untuk PPN 0,7371 dan untuk PPh 1,2040 dalam satuan hitung.

Tabel. Regresi Linear Sederhana

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	12.947.138,18	5.817.773,92	2,2254	0,0399
PPN	0,7371	0,1174	6,2805	0,0000
PPh	1,2040	0,0860	13,9971	0,0000

KESIMPULAN

Pendapatan PPN dan PPh dengan rata-rata penerimaan Pajak Pusat pada DJP sepanjang tahun penelitian ini adalah untuk PPN sebesar Rp. 258.8 juta dan untuk PPh sebesar Rp. 376.5 juta dan untuk Pajak pusat itu sendiri dengan rata-rata sebesar Rp. 657.1 juta. Dengan demikian penerimaan pendapatan PPN dan PPh terhadap Pajak Pusat pada DJP sangat pengaruh erat dengan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Hubungan antara PPN dan PPh terhadap Pendapatan Pajak Pusat pada DJP memiliki hubungan yang positif yang mengartikan bahwa bila terjadi peningkatan Penerimaan PPN dan PPh maka akan meningkatkan pendapatan Pajak Pusat pada DJP. Pengaruh PPN dan PPh signifikan terhadap pendapatan Pajak Pusat pada DJP (sig. 0.00 < 0,05) dan PPN dan PPh memiliki kontribusi yang berpengaruh terhadap pendapatan Pajak Pusat dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Due, John F. Government Finance 7 edition, terjemahan Ellen Gunawan dan Rudy Sitompul. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1984
- Teguh Hadi Wardoyo dan Amin Subiyakto. 2017. Taxation Pengantar Perpajakan Indonesia.
- Subekti dan Asrori. 2000. Dasar-Dasar Perpajakan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suandy. 2011. Hukum Pajak. edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat. Tangerang: TaxSys.
- Santoso, 2020. Penerimaan pajak lesu, apa dampaknya ke APBN. Minggu, 20 September 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-lesu-apa-dampaknya-ke-apbn>

- Resmi. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Pajak Pusat. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859>
- Supramono. 2009. Perpajakan Indonesia. Andi. Yogyakarta.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba
- Salim. 2010. Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
- Undang-Undang No 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang No 44 tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- www.pajak.go.id
- <https://peraturan.bpk.go.id>

KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

KEBIJAKAN EDITORIAL

Penerbitan EKONOMIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia Bandung adalah hasil kerjasama para dosen paa program studi Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran. Jurnal ini akan diterbitkan secara berkala (setiap enam bulan) dengan tujuan untuk pengaplikasian dan penerapan serta menyebarluaskan hasil pengembangan dan pengkajian di bidang manajemen baik pada sector public, sector nirlaba lainnya, maupun sector swasta yang meliputi sector industry, perdagangan, jasa, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis menerima kiriman artikel yang ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke Jurnal Ekonomi dan Bisnis belum pernah dipublikasikan baik Nasional maupun Internasional.

Hak penerbitan ada pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Advent Indonesia Bandung, seangkan hak cipta naskah tetap pada pemakalah.

Penentuan artikel yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis adalah melalui proses review oleh Dewan Redaksi dan Dewan Penyunting. Dewan Redaksi bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan, jika dipandang perlu, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirim ke Redaksi Jurnal Ekonomi dan Bisnis dengan alamat:

Dr. Romulo Sinabutar MBA (Editor)
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Advent Indonesia
Jl. Kol. Masturi 288, Hp. 081322169087
Parongpong, Bandung.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Sistematika penulisan mengikuti gaya Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia
2. Naskah artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan belum pernah dipublikasikan
3. Panjang tulisan antara 12 – 20 halaman, jarak baris 1.15 spasi dan kertas berukuran quarto
4. Naskah yang dikirim ke redaksi dengan urutan format penulisan yang terdiri dari: Judul, Nama Penulis, Abstraksi, Pendahuluan, Ulasan, Penutup, dan Referensi.
5. Abstraksi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, secara ringkas memuat uraian tentang masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstraksi terdiri dari 150 – 300 kata dan diikuti kata kunci yang berisikan konsep dasar atau ide yang mewakili bidang yang diteliti. Kata kunci terdiri dari 3 – 5 kata.
6. Pendahuluan berisi latar belakang dan perumusan masalah, studi kepustakaan, tujuan, dan manfaat serta kontribusi hasil
7. Ulasan berisi metode penelitian serta hasil dan pembahasan
8. Penutup berisi kesimpulan dan saran, baik berkaitan dengan topik bahasan atau untuk peneliti berikutnya (jika ada)
9. Referensi ditulis dengan format seperti contoh, sebagai berikut:

Gitman, Lawrence. HM., 2000, J., *Principles of Managerial Finance*, International Edition, 9th Edition, Addison Wesley Publishing Company, USA

Baso, Moeradi. HM, 1999, “*Tantangan dan Peluang Lembaga dan Profesional Pengembangan Sumber Daya Manusia menjelang dan Dalam Era Globalisasi*”, Majalah Manajemen Usaha Indonesia, Edisi No. 5, Tahun XXVIII, Mei.